



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

SEJARAH SMA / SMK

Kelompok Kompetensi I

Profesional :

Problematika Sejarah Tematis

Pedagogik :

Pengembangan Media Pembelajaran & PTK

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL
GURU PEMBELAJAR

Mata Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kelompok Kompetensi I :

Profesional : Problematika Sejarah Tematis

Pedagogik : Pengembangan Media Pembelajaran dan PTK

PENYUSUN

Yudi Setianto, M.Pd.

Syachrial Ariffiantono, M.Pd.

Didik Budi Handoko, S.Pd.

Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016

Penulis:

1. Yudi Setianto, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081336091997, yudiroyan@gmail.com
2. Syachrial Ariffiantono, M.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 081334222929, syachrial1998@gmail.com
3. Didik Budi Handoko, S.Pd., PPPPTK PKn dan IPS, 08113778815, didikbh@gmail.com
4. Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum, 08564653357, PPPPTK PKn dan IPS rifatul.fikriya@yahoo.com

Penelaah:

1. Drs. Kasimanuddin Ismain, M.Pd, Universitas Negeri Malang, 081334063349, ikasimanuddin@gmail.com
2. Endang Setyoningsih, S.Pd., SMAN 10 Malang, 081334469744
3. Deny Yudo Wahyudi, M.Hum, Universitas Negeri Malang, 081944858400, deny.yudo.fis@um.ac.id
4. Budi Santoso, S.Pd., 081334732990, SMP Negeri 02 Batu busan_audams@yahoo.co.id

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggungjawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D

NIP. 195908011985032001



KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS

Drs. M. Mahadjir, M.A
NIP. 85905241987031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Peta Kompetensi	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Saran Penggunaan Modul	6
Profesional: Problematika Sejarah Tematik	
Kegiatan Pembelajaran 1: Metodologi dan Historiografi	8
A. Tujuan Pembelajaran	8
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	8
C. Uraian Materi	8
D. Aktivitas Pembelajaran	32
E. Latihan / Kasus / Tugas	33
F. Rangkuman	33
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	34
Kegiatan Pembelajaran 2: Sejarah Lokal dan Penerapannya dalam	
Pembelajaran	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	35
C. Uraian Materi	35
D. Aktivitas Pembelajaran	57
E. Latihan / Kasus / Tugas	58
F. Rangkuman	59
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	60
Kegiatan Pembelajaran 3: Sejarah Ekonomi Indonesia	61
A. Tujuan Pembelajaran	61
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	61
C. Uraian Materi	61
D. Aktivitas Pembelajaran	72
E. Latihan / Kasus / Tugas	73
F. Rangkuman	73
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	74
Pedagogik: Pengembangan Media Pembelajaran	
Kegiatan Pembelajaran 4 Analisis RPP	75
A. Tujuan Pembelajaran	75
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	75

C. Uraian Materi	75
D. Aktivitas Pembelajaran.....	88
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	89
F. Rangkuman.....	93
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	93
Kegiatan Pembelajaran 5 Analisis Butir Soal dengan Program	
Berbantuan Komputer	95
A. Tujuan Pembelajaran	95
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	95
C. Uraian Materi	95
D. Aktivitas Pembelajaran.....	111
E. Latihan / Kasus / Tugas.....	112
F. Rangkuman.....	113
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	114
Daftar Pustaka.....	115

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan

kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru Sejarah SMA/SMK adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, danPaket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasdan Angka Kreditnya.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya..
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Tujuan

Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru Sejarah SMA/SMK dalam memahami materi Sejarah Sekolah Menengah Atas. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi Sejarah SMA/SMK sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

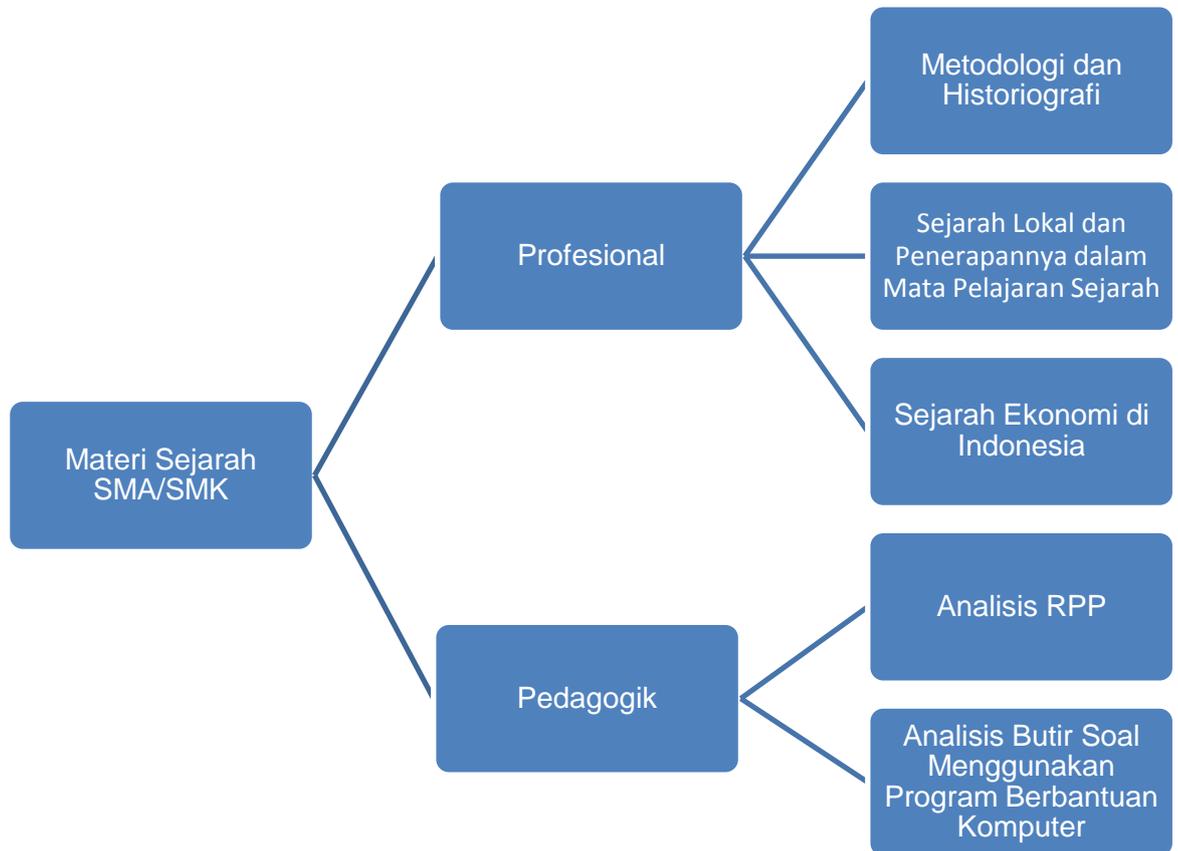
Kita akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi professional dan pedagogik. Materi profesional terkait dengan materi sejarah sesuai sejarah tematik, sehingga materi ini mencakup Metodologi dan Historiografi, Sejarah Lokal dan Penerapannya dalam Mata Pelajaran Sejarah, Sejarah Ekonomi di Indonesia. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti analisis RPP, Analisis Butir Soal dengan Program Berbantuan Komputer serta PTK.

C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Metodologi dan Historiografi	memahami dan menganalisa metodologi sejarah dan historiografi
2.	Sejarah Lokal dan Penerapannya dalam Mata Pelajaran Sejarah	Menunjukkan perkembangan sejarah lokal serta implementasinya dalam pembelajaran di SMA untuk mata pelajaran sejarah
3.	Sejarah Ekonomi di Indonesia	Mampu memahami sejarah ekonomi Indonesia sebagai bagian dari perkembangan sejarah Indonesia
4.	Analisis RPP	Menganalisis RPP sesuai prinsip dan sistematika yang berlaku
5.	Analisis Butir Soal Menggunakan Program Berbantuan Komputer	Mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sehingga diketahui informasi diagnostik

D. Ruang Lingkup



E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran sejarah di SMA/SMK

- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

METODOLOGI DAN HISTORIOGRAFI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul PKB ini, peserta diharapkan mampu menganalisis metodologi sejarah dan historiografi

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menganalisis jenis-jenis penelitian sejarah
2. Menyusun tahapan penelitian sejarah

C. URAIAN MATERI

Sejarah Sebagai Ilmu

Dalam dunia ilmu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika memenuhi beberapa syarat. Sejarah merupakan ilmu karena sejarah memiliki syarat-syarat sebagai ilmu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Objek

Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia, bedanya sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Selanjutnya objek sejarah dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumber-sumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau (Zed, 2002: 48). Bukti-bukti itu merupakan kesaksian sejarah yang bisa dilihat. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya.

2. Tujuan

Menurut Sutrasno (1975: 22) sejarah bertujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceritakan segala yang terjadi apa adanya

- b. Membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis.

Makin objektif (makin dekat kepada kenyataan sejarah yang sesungguhnya) makin baik, karena dengan demikian pembaca akan mendapat gambaran sesungguhnya tentang apa yang benar-benar terjadi.

3. Metode

Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah bersifat universal, artinya metode sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmu-ilmu sosial.

4. Kegunaan

Menurut Widja (1988: 49-51) sejarah paling tidak mempunyai empat kegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Guna edukatif adalah sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang mempelajarinya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Selanjutnya berarti bahwa kita bisa mengambil dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep-konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan-harapan di masa akan datang.

Guna inspiratif terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa. Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan *nation building*. Di negara-negara yang sedang berkembang guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif.

Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk "pesona perlawatan". Dengan membaca sejarah seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini.

Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan/ketrampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya.

Kuntowijoyo (1995: 19-35) membedakan guna sejarah menjadi guna ekstrinsik dan guna intrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi, (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik merupakan manfaat sejarah terutama di bidang pendidikan. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, (8) ilmu bantu. Dalam guna ekstrinsik selain pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (1) latar belakang, (2) rujukan, dan (3) bukti.

5. Sistematika

Bentuk sistematika dalam sejarah berupa periodisasi dan percabangan dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu. Secara garis besar materi sejarah dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok teori sejarah dan kelompok kajian sejarah. Kelompok teori sejarah, seperti Pengantar Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Metodologi dan Historiografi. Kelompok kajian sejarah masih terbagi lagi dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia dan sejarah tematis. Masing-masing masih terpecah dalam cabang-cabang lagi, seperti sejarah tematis terdiri atas sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah maritim, dan sebagainya.

6. Kebenaran

Sedikitnya ada dua teori kebenaran yang biasanya bisa dikaitkan dengan usaha pengujian kebenaran fakta, yaitu kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Kebenaran korespondensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila sama dengan realitasnya. Apa yang disebut realitas dalam konteks sejarah adalah kenyataan yang benar-benar telah terjadi, suatu kenyataan seperti apa adanya yang tidak tergantung pada orang yang menyelidikinya. Sedangkan kebenaran koherensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar jika cocok dengan pernyataan-pernyataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan kita terima kebenarannya. Jadi, kebenaran itu tidak dicari dalam hubungan pernyataan dengan realitas, tapi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya.

Oleh karena sejarah terjadi satu kali, pada masa lampau, dan tidak bisa diulang, maka dari dua teori kebenaran itu, teori kebenaran koherensi yang tepat bagi sejarah.

7. Generalisasi

Generalisasi atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utamanya. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan, untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu (Widja, 1988: 3).

Akan tetapi, banyak juga sejarawan yang membicarakan sifat-sifat umum, di samping juga kekhususan, dari masing-masing revolusi, seperti revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, dan sebagainya. Demikian juga sejarawan Sartono Kartodirdirjo yang juga telah berhasil memberikan generalisasi tentang gerakan-gerakan protes di Jawa.

8. Prediksi

Prediksi dapat diartikan sebagai berlakunya hukum dikemudian hari. Hukum sejarah adalah keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian, yang memberikan rupa persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Dalam sejarah keteraturan yang menjadi unsur utama dari suatu hukum dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, yaitu sepanjang keteraturan itu bisa diserap pada sejumlah kejadian yang berarti pula tidak ada jaminan bahwa keteraturan itu bisa diterapkan pada setiap kejadian, dan bahwa kejadian-kejadian itu dibatasi hanya kejadian yang punya rupa persamaan, bukan kejadian yang memang benar-benar sama (identik). Dengan kata lain, hukum itu berlaku apabila bisa dilihat unsur-unsurnya pada peristiwa, kalau tidak maka berarti hukum itu tidak berlaku. Kenyataan ini tidak menghalangi usaha untuk memproyeksikan pengalaman masa lampau ke situasi masa kini dan akan datang. Meskipun tidak dengan landasan prediksi seperti yang terjadi dalam ilmu alam.

Sumber Sejarah dan Fakta Sejarah

1. Sumber Sejarah

Sumber sejarah tidak dapat melukiskan sejarah serba objek seluruhnya. Sumber sejarah hanyalah mengandung sebagian kecil kenyataan sejarah. Atau tidak dapat merekan peristiwa secara keseluruhan (Ali, 2005:16). Sumber sejarah atau dapat juga disebut data sejarah (Kuntowijoyo, 1995:94) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah atau data sejarah inilah yang disebut dengan heuristik (Hariyono, 1995:54).

Sumber sejarah adalah semua peninggalan manusia (peninggalan sejarah) dari masa lampau. Peninggalan sejarah dapat berupa benda-benda, seperti bangunan (candi, patung, masjid, makam), peralatan hidup (senjata, tombak, keris, gamelan), perhiasan (emas, perak, perunggu, dll) dan juga dapat berupa tulisan, seperti prasasti, karya sastra, dokumen.

Menurut jenisnya: *Pertama*, sumber tertulis (tekstual), yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis ada 3 macam, yaitu: a. Sumber tertulis sezaman dan setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah dan berasal dari lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Prasasti Yupa tentang Kerajaan Kutai (Abad ke-4 Masehi). Prasasti ini ditulis atas perintah Raja Mulawarman (sezaman dengan Kerajaan Kutai) dan ditemukan di sungai Muarakaman Kutai (setempat dengan kerajaan Kutai). b. Sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah tetapi bukan berasal dari daerah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab *Ling Wai Taita* karya Chou Ku Fei tahun 1178 tentang Kerajaan Kediri. Sumber ini sezaman dengan Kerajaan Kediri (Abad 10-12) tetapi berasal dari Cina (tidak setempat). c. Sumber tertulis setempat tetapi tidak sezaman. Maksudnya sumber tertulis itu berasal dari daerah/lokasi terjadinya peristiwa sejarah tetapi ditulis jauh sesudah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Babad Tanah Jawi yang ditulis pada zaman Kerajaan Mataram Islam tetapi isinya tentang akhir Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang tidak sezaman dengan masa Kerajaan Mataram Islam.

Kedua, *Sumber lisan* (oral): keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 3. *Sumber benda*

(korporal): sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya: fosil, senjata, candi. 4. *Sumber rekaman* yang berbentuk foto dan kaset video. Misalnya: foto peristiwa proklamasi kemerdekaan.

Menurut tingkat pemerolehan: *Sumber primer* (pertama): peninggalan asli sejarah yang berasal dari zamannya. Misalnya: prasasti, candi, masjid. 2. *Sumber sekunder* (kedua): benda-benda tiruan dari benda aslinya, seperti prasasti tiruan, terjemahan kitab-kitab kuna. 3. *Sumber tersier* (ketiga): berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung

Objektivitas dan Subjektivitas dalam Sejarah

Apabila di perpustakaan terdapat buku-buku sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan, buku-buku tersebut dapat diartikan sebagai sejarah dalam arti subjektif, artinya karya-karya itu memuat unsur-unsur dari subjek. Setiap pengungkapan atau penggambaran telah melewati proses "pengolahan" dalam pikiran dan angan-angan seorang subjek. Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas diamati, dialami, atau dimasukkan ke pikiran subjek sebagai persepsi, sudah barang tentu sebagai "masukan" tidak akan pernah akan menjadi benda tersendiri, tetapi telah diberi "warna" atau "rasa" sesuai dengan "kacamata" atau "selera" subjek (Kartodirdjo, 1992: 62). Untuk dapat dipelajari secara objektif (yakni dengan maksud memperoleh pengetahuan yang tidak memihak dan benar, bebas dari reaksi pribadi seseorang), sesuatu pertama kali harus menjadi objek; ia harus mempunyai eksistensi yang merdeka di luar pikiran manusia (Gottschalk, 1986: 28). Akan tetapi, kenangan tidak mempunyai eksistensi di luar pikiran manusia, sedangkan kebanyakan sejarah didasarkan atas kenangan, yakni kesaksian tertulis atau lisan.

Kata "benar" dan "objektifitas" tidak mempunyai pengertian yang sama dan tidak boleh dipakai sebagai kata yang searti. Secara mutlak sejarah memang tidak bisa "benar" sebab sejarah tidak bisa menciptakan kembali, masa lampau. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian, penulisan sejarah didasarkan atas aturan dan metode yang menjamin keobjektifannya (Frederick, Soeroto, 2005: 10). Jadi ada parameter untuk menilai, sejauh mana penulisan itu gagal mencapai tujuannya.

Dalam kehidupan sehari-hari sejarawan tidak hidup dalam suatu kekosongan, seluruh kesadarannya "terendam" dalam suatu kultur dan segala aspeknya. Lingkungan fisik, biologis, ekonomis, sosial, politik, religius semua itu mempunyai pengaruh pada dirinya. Jadi, lingkungan di mana seseorang hidup dan pandangan dunia sangat mempengaruhi pandangannya terhadap lingkungannya. Ada empat faktor yang menyebabkan sejarawan berbeda pandangan dan tafsiran (Notosusanto, 1979: 15), yaitu:

1. Sikap berat-sebelah pribadi
2. Prasangka kelompok
3. Penafsiran yang berbeda tentang faktor kelompok
4. Pandangan dunia (*Weltanschauung*).

Sikap berat sebelah-pribadi atau "*personal likes and dislikes*" adalah rasa tidak senang terhadap individu maupun jenis orang. Ada sejarawan yang menyukai orang-orang besar dalam sejarah (seperti Thomas Carlyle), tetapi ada juga sejarawan yang membenci tokoh-tokoh besar (seperti H.G. Wells).

Prasangka kelompok (*group prejudice*), adalah anggapan yang dikandung masing-masing sejarawan sebagai anggota suatu kelompok, baik nasional, keagamaan, maupun sosial. Sejarawan Indonesia akan mempunyai pandangan lain mengenai Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 dengan Sejarawan Belanda. Menurut Sejarawan Indonesia perang itu dinamakan "perang kemerdekaan", tetapi menurut Sejarawan Belanda peristiwa itu disebut "aksi polisional" saja.

Penafsiran yang berbeda tentang faktor-faktor sejarah, adalah tafsiran yang berlainan mengenai apa sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya peristiwa. Misalnya apakah yang paling menentukan bagi kemenangan Indonesia pada tahun 1949? Ada yang berpendapat faktor militer (suksesnya perang gerilya), ada pula yang mengatakan faktor ekonomi (perlunya Belanda membangun kembali negerinya dan kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia yang meskipun diblokade tetap tegak berdiri).

Pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang berbeda akan membawa pengaruh dalam penulisan sejarah, terutama sejarah dunia atau sejarah umat manusia. Sejarawan keagamaan tentu akan lain tafsirannya dengan sejarawan materialis. Manusia hanya mengenal satu jalan untuk mencapai masa lampau itu supaya memahaminya, dan jalan itu melalui proses pemikiran. Masa lampau

hanya satu, tetapi pandangan manusia terhadapnya senantiasa berubah dan berbeda-beda tanpa pembatasan (Frederick, Soeroto, eds., 2005: 6).

Menulis sejarah yang objektif mengandung persoalan yang bersifat metodologis, karena itu perbedaan utama antara historiografi tradisional dengan historiografi modern, terletak pada metodologinya. Menulis yang seratus persen objektif tampaknya merupakan harapan yang melambung. Karena apa yang sebenarnya terjadi tidak akan pernah terekam secara lengkap. Seorang penulis sejarah pasti dihadapkan kepada pemilihan sumber dan menghadapi macam-macam sumber yang harus diputuskan.

Metode Penelitian Sejarah

Terdapat beberapa pengertian mengenai metode penelitian sejarah atau biasa disebut dengan metode sejarah saja. Beberapa pengertian tersebut di antaranya:

1. Louis Gottschalk berpendapat bahwa metode sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi masa lampau itu berdasarkan data yang di peroleh melalui kritik sumber (Gotschalk, 1986:32).
2. Menurut Sartono Kartodirdjo metode sejarah adalah alat untuk mengorganisasi seluruh tubuh pengetahuan serta menstrukturasi pikiran. Jadi, metode sejarah berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memperoleh pengetahuan mengenai masa lampau (Kartodirdjo, 1992: ix).

3. Gilbert J. Carraghan berpendapat:

“A systematic body of principles and rules designed to aid effectively in gathering the source materials of history, appraising them critically, and presenting a synthesis (generally in written) of the result achieved”.

(Metode sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengujikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan” (dalam Alfian, 1983:14).

Jenis-jenis Penelitian Sejarah

Jenis penelitian sejarah dapat dikelompokkan menjadi empat. Jenis-jenis yang di maksud adalah:

1. *Studi Eksploratif*, tujuannya menggali data, sumber, atau informasi sebanyak-banyaknya. Biasanya penelitian semacam ini sumber-sumber, bukti, ataupun referensi sangat sulit didapatkan, karena masih langka atau masih belum ada, tetapi sumber-sumber awal atau yang dikenal dengan “jejak” sejarah, menunjukkan kebenaran adanya persoalan yang akan diteliti. Dalam konteks seperti ini, bukti sejarah lisan dapat digunakan sebagai data pendukung. Biasanya, model penelitian semacam ini tidak perlu menggunakan hipotesis, karena dimaksudkan bukan untuk menguji sesuatu, juga bukan untuk penelitian eksperimental. Penyajian hasil akhir penelitian dipaparkan secara deskriptif naratif, artinya menulis apa adanya tanpa analisis dan interpretasi yang dalam (Abdullah et.al,eds., 1985:6).
2. *Studi Tematik*, yakni meneliti topik-topik tertentu dari masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, agama,, atau yang lainnya dalam aspek-aspek tertentu. Jenis penelitian seperti ini tampaknya paling banyak dilakukan peneliti dengan berbagai tujuan. Banyak sedikitnya variabel dan aspek yang akan diteliti sangat bergantung pada pilihan dan kemampuan si peneliti. Termasuk juga dalam penelitian seperti ini, studi korelasi, baik sejajar maupun kausalitas; studi perkembangan, studi biografi, dan otobiografi baik untuk mengenal pemikiran, karya, peran seseorang atau lainnya seperti kemampuan *leadership*, manajerial, sistem pemerintahan, kemajuan peradaban, faktor-faktor kemajuan dan kemunduran, sistem teknologi dan lain sebagainya, mencari hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Pendekatan yang digunakan bergantung pada peneliti, sekurang-kurangnya menggunakan satu pendekatan, tetapi jika aspek tinjauannya kompleks, harus menggunakan banyak pendekatan, metode analisisnya dengan analisis kausalitas.
3. *Studi Komparasi*, tujuannya membandingkan dua masalah atau lebih yang ada kemiripan atau keterkaitan, baik antara dua masalah masa lampau atau sebuah masalah masa lampau dengan masalah masa kini. Kegunaannya mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing, mengetahui berbagai kemajuan yang dicapai di berbagai sektor; ekonomi, politik, sains dan teknologi, sistem pemerintahan, kesenian, pendidikan dan lain-lain serta faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Banyak sedikitnya pendekatan yang digunakan bergantung kebutuhan, artinya penelitian itu

menekankan aspek-aspek apa saja. Sementara analisisnya menggunakan kausal komparatif.

4. *Studi Prediktif*, yakni memperkirakan sesuatu yang pernah terjadi karena dimungkinkan kejadian itu akan berulang, agar tidak memperburuk kondisi. Untuk keperluan tersebut harus ada perangkat-perangkat tertentu sebagai alat ukur yang telah di ujicobakan. Teknik analisisnya dapat menggunakan kausal komparatif.

Dalam kaitanya dengan model-model studi ini, Notosusanto (1979:6-7) menyebutkan setidaknya-tidaknya ada lima mazhab sejarah yang masing-masing memiliki ciri tersendiri, terutama dalam penulisan dan pengambilan kesimpulan. Kelima mazhab itu adalah:

1. Mazhab unik
2. Generalis terbatas
3. Mazhab interpretatif
4. Mazhab komparatif
5. Mazhab nomothatif (prediktif)

Mazhab *pertama*, kelompok sejarawan yang sengaja tidak menggunakan generalisasi dalam pengambilan kesimpulan, kecuali menyadarinya. Jika menyadari bahwa mereka telah menggunakan generalisasi, mereka akan menghindarinya. *Kedua* mazhab generalisasi terbatas ketat. Yakni, mereka yang terdiri atas sejarawan deskriptif naratif ; mereka ini hanya menuliskan peristiwa-peristiwa apa adanya, tidak menafsirkan, tidak ada analisis, dan tidak ada komentar. *Ketiga*, mazhab interpretatif, yakni kelompok sejarawan yang berusaha keras menemukan benang merah “kecenderungan” dalam peristiwa sejarah, yang memungkinkan untuk selanjutnya membuat sintesis dari peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan. *Keempat*, mazhab komparatif, yakni kelompok sejarawan yang mencari episode-episode atau keteraturan-keteraturanyang sejajar (analog) dengan cara membandingkan dua peristiwa atau lebih, yang berhubungan secara kausalitas maupun tidak. *Kelima*, mazhab nomothatif (prediktif), yakni kelompok sejarawan yang sengaja memperoleh kembali generalisasi yang telah terbukti kebenarannya di masa lampau untuk dimungkinkan terbukti lagi kebenarannya di masa depan. Oleh karena itu, harus ada nilai ukuran-ukuran dasar (yang telah teruji) sebagai patokan untuk memprediksi kejadian bila dimungkinkan terjadi kembali. Maka yang terpenting

dari alat ukur tersebut adalah solusi cara menaggulangi serta mengendalikan jika peristiwa tersebut berulang.

Tahap-Tahap dalam Penelitian Sejarah

Langkah-langkah penelitian sejarah meliputi lima tahap (Kuntowijoyo,1995:91), yaitu:

1. Pemilihan masalah penelitian dan penentuan topik;
2. Pengumpulan sumber (heuristik);
3. Verifikasi (Kritik sumber);
4. Interpretasi: analisis dan sintesis;
5. Penulisan (Historiografi).

1. Pemilihan Masalah Penelitian dan Penentuan Topik

Untuk seorang pemula pemilihan topik tidaklah mudah, karena permasalahan sejarah sangat banyak dan hampir semuanya baru, belum ditulis orang. Kesulitan yang lain, bahwa topik yang ditulis adalah sejarah dan bukan sosiologi, antropologi atau ilmu-ilmu yang lain. Topik yang dipilih tidak terlalu luas, dapat dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan.

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat itu, subjektif dan obyektif, sangat penting, karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau ia senang dan dapat. Setelah topik ditentukan langkah selanjutnya membuat rancangan penelitian.

a. Kedekatan Emosional

Apabila seseorang penulis tertarik pada topik sejarah lokal, misal tentang sejarah desa dimana penulis dilahirkan dan ingin berbakti pada desa itu, menulis desa sendiri adalah paling strategis. Sebagai orang yang dihormati dan dipercaya harapannya demikian mungkin penulis punya hubungan dengan orang dalam, sehingga bukan saja dapat dukungan moral dari pejabat desa, tetapi akan dengan mudah mendapatkan keterangan lisan, almari arsip di kelurahan juga terbuka. Mungkin yang ditulis hanya sebuah desa, tetapi desa itu pastilah mewakili jenisnya hingga dapat dibuat generalisasi. Lokasi yang begitu kecil seperti desa ternyata banyak menyimpan persoalan. Persoalan-persoalan itu bisamenyangkutpertanahan, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, kriminalitas, dan lain-lain.

Bermula dari batasan geografis orang mengatakan itu berarti pertanyaan *where*, yaitu daerah atau desa mana yang menjadi objek penelitian. Kemudian batasan waktu ditetapkan, dalam arti sumber tertulis dan sumber lisan masih tersedia. Untuk desa-desa di Indonesia biasanya dapat dilacak sampai tahun 1950an. Ini berarti pertanyaan tentang *when*. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat didalamnya; misalnya tentang pertanahan tentu dapat dilacak siapa saja yang telah melakukan transaksi dan identitasnya, itu pertanyaan tentang *who*. Kemudian perlu diketahui apa yang dikerjakan oleh siapa, ini pertanyaan *what* apabila kasus tanah, apa saja yang dikerjakan, jual, beli, sewa, gadai, bagi hasil, atau hibah. Apa motivasi tiap-tiap perbuatan, pertanyaan tentang *why*. Pertanyaan secara umum dapat pula diajukan misalnya apa yang terjadi dalam kasus tanah itu dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ini berarti penulis harus membagi-bagi peristiwa, periodisasi, ke dalam babakan waktu. Misalnya melalui pengalaman atau bacaan awal ditemukan bahwa di desa yang menjadi area penelitian ada proses pemiskinan, yaitu para petani tidak lagi punya tanah. Proses ke arah itulah yang jadi pertanyaan *how*, bagaimana terjadinya.

b. Kedekatan Intelektual

Diandaikan apabila seseorang sudah membaca-baca topik yang mempunyai kedekatan emosional dengan dirinya. Tentu saja jika seseorang tertarik masalah pedesaan, pasti buku-buku yang terkait dengan masalah itu, petani, tanah, geografi pedesaan.

Khusus masalah pertanahan, mungkin penulis juga aktivis LSM, sehingga tingkat kepedulian itu tidak hanyapersoalan intelektual, namun juga tentang aksi. Dia sudah punya konsep, misalnya tentang pemiskinan petani. Akan tetapi, generalisasi semacam itu hanyalah anggapan awal yang harus dibuktikan melalui penelitian, jangan sampai menjadi gagasan yang punya harga mati.

Resiko lain, apabila seseorang terlibat secara emosional ialah pertimbangan intelektualnya akan dipengaruhi emosi, sehingga sejarah berubah menjadi pengadilan. Padahal sejarah adalah ilmu empiris yang harus menghindari nilai subjektif. Kedekatan emosional itu harus diakui secara jujur supaya orang dapat membuat jarak.

c. Jarak Penelitian

Penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi objek yang telah terjadi pada masa lalu secara sistematis dan objektif dan mengkaji bagaimana kaitanya dengan kondisi masa kini (Moehnilabib, 2003:46). Objek tersebut bisa berupa benda-benda historis, peristiwa-peristiwa historis, gejala-gejala, atau hubungan-hubungan yang berdimensi historis. Rekonstruksi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, mensintesis bukti-bukti yang berkaitan dengan objek historis tersebut.

Sebelum proses rekonstruksi berlangsung, peneliti harus membuat rencana penelitian, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk sebuah lembaga. Rencana penelitian itu harus berisi: a. permasalahan; b. historiografi; c. sumber sejarah; d. garis besar (Kuntowijoyo, 1995 :95). Dalam permasalahan, perlu dikemukakan masalah pokok yang akan diteliti. Mengapa perlu diteliti sejarahnya. Memaparkan maksud dan tujuan penelitian. Luasan dan batas penelitian dalam ruang dan waktu. Teori dan konsep apa yang dipakai.

Dalam historiografi, perlu dikemukakan sejarah penulisan dalam bidang yang akan diteliti. Kalau objek kajian mengambil soal tanah, seluruh penelitian sejarah mengenai tanah harus *direview*. Dengan *review* itu akan diketahui apa kekurangan para peneliti terdahulu, dan apa yang masih perlu diteliti. Jika tulisan peneliti menguatkan, meneruskan dan membantah sebagai tulisan dengan objek kasus yang sama, biarlah orang tahu. Apabila penelitian itu sangat orisional, dan tidak ada historiografinya, kadang-kadang historiografi diganti dengan bibliografi. Bibliografi ini isinya sama dengan historiografi.

Sebelum memulai penelitian lapangan, orang harus tahu sumber sejarah yang akan dicari, bagaimana mencari dan dimana dicari. Misalnya, soal tanah harus dicari data tentang akad tanah. Data ini bisa ditemukan dengan membaca, sebagian lain bisa dengan wawancara atau sumber lisan. Dikelurahan dan kabupaten ada data mengenai daftar perpindahan tanah dari satu pemilik ke pemilik baru. Data itu, dapat dibaca, sementara peneliti juga dapat bertanya pada orang-orang yang bersangkutan.

Garis besar penelitian harus segera tampak, memang penelitian sejarah dan bukan penelitian sosial. Lebih baik garis besar itu terurai sehingga dengan mudah orang membaca. Yang lebih penting lagi ialah garis besar itu dapat

berubah. Garis besar sementara itu sangat berguna dalam proses penelitian sebab setiap data dapat langsung dimasukkan dalam bab-babnya.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Usaha sejarawan dalam rangka memilih sesuatu subjek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek disebut heuristik. Heuristik sejarah pada hakikatnya tidak berbeda dengan kegiatan bibliografis yang lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak. Akan tetapi, sejarawan harus mempergunakan banyak material yang tidak terdapat dalam buku-buku.

Untuk mengatasi kebingungan atas banyaknya material, maka sejarawan harus selektif dalam memilih sumber. Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Misalnya saja seseorang akan melakukan penelitian Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Sumber apa yang harus ditemukan oleh seorang peneliti? Sumber itu, menurut bahannya, dapat dibagi dua, tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak. Selain itu karena topik diatas termasuk sejarah kontemporer, pastilah ingatan orang akan peristiwa-peristiwa antara tahun 1963-1966 masih banyak direkam. Apalagi dengan topik yang kontemporer, tentu sumber-sumber lisan banyak tersedia, karena itu peneliti harus melacaknya melalui sejarah lisan. Demikian pula, karena objek kajian adalah sejarah politik sumber yang berupa surat-surat keputusan pemerintah pasti tersedia.

a. Dokumen Tertulis

Jika penulis sudah menentukan permasalahan yang akan ditulis dan lokasinya, yaitu Indonesia-Malaysia, kemudian rentang waktu, 1963-1966. Tahun 1963 sebagai permulaan konflik antara Indonesia- Malaysia karena munculnya kabar pembentukan negara Federasi Malaysia oleh pemerintah kolonial Inggris. Konflik ini diakhiri tahun 1966, setelah Indonesia dibawah Presiden Soekarno, gagal membendung pembentukan negara Federasi Malaysia, terlebih karena di dalam negeri Indonesia mengalami perubahan politik dari dari Soekarno ke Soeharto setelah adanya peristiwa G30S. Perubahan politik ini menyebabkan berubahnya kebijakan politik sehingga konflik antara Indonesia-Malaysia berakhir dengan damai.

Dengan persoalan yang sudah tergambar jelas, peneliti mulai mencari sumber sejarah. Pada tingkat ini, sebelum melalui keabsahan dan interpretasi

masih disebut data sejarah, belum menjadi fakta sejarah. Dokumen tertulis dapat berupa surat-surat, notulen rapat, surat keputusan seperti Keppres, Kepmen dan lain-lain. Surat dapat berupa surat pribadi, dinas kepada pribadi dan sebaliknya, atau antardinas. Surat semacam itu dapat ditemukan di almari pribadi atau dinas. Notulen rapat dinas dapat ditemukan di kantor. Dan notulen rapat militer dapat dilacak di kantor arsip militer.

b. Artefak

Artefak dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat yang lain. Foto sangat mungkin dimiliki oleh pemerintah. Foto-foto ketika apel para sukarelawan yang hendak dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara. Foto ketika Presiden Soekarno memimpin rapat di antara para menteri dan petinggi militer di Istana Negara. Foto-foto yang berlokasi di perbatasan Kalimantan Utara yang menggambarkan kesiapan prajurit TNI bersama para sukarelawan. Demikian juga data lain tentang pakaian, kendaraan tempur, jenis persenjataan, mungkin terungkap lewat foto. Bangunan bersejarah yang pernah dipakai untuk rapat-rapat. Lapangan atau stadion yang pernah dipakai untuk apel para sukarelawan. Namun, sedapat mungkin peneliti menemukan bangunan yang masih asli, belum mengalami perubahan atau renovasi.

Menurut urutan penyampaiannya, sumber itu dapat dibagi ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila disampaikan oleh saksi mata. Misalnya, catatan rapat, daftar peserta rapat, daftar sukarelawan dan arsip-arsip laporan intelijen. Apa yang disebut sumber primer oleh sejarawan, misalnya arsip-arsip Negara, sering disebut sumber sekunder dalam penelitian ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, yang dianggap sumber primer adalah wawancara langsung pada responden. Sedangkan ilmu sejarah sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Sejarawan tidak mempersoalkan sumber primer atau sekunder seandainya hanya terdapat satu sumber. Misalnya data sejarah tentang jumlah murid sekolah pada abad ke-19, sejarawan hanya bergantung pada laporan tercetak. Sejarawan wajib menuliskan dari mana data itu diperoleh, baik primer maupun sekunder.

c. Sumber Lisan

Tradisi lisan telah menjadi sumber penulisan bagi antropolog dan sejarawan. Akan tetapi, dalam ilmu sejarah penggunaan tradisi lisan merupakan hal yang baru. Di Indonesia kegiatan sejarah lisan sebagai penyediaan sumber

dimulai oleh Arsip Nasional RI sejak tahun 1973. Penataran-penataran untuk melatih pewawancara sudah sering dilakukan. Pengumpulan sumber sejarah lisan mempunyai teknik-teknik dan prasarana tersendiri. Pekerjaan yang terpenting, yang langsung mengenai pengumpulan sejarah lisan ialah wawancara, menyalin, dan menyunting. Selanjutnya sebagai sumber, sama halnya dengan bahan arsip atau perpustakaan ialah sebagaimana dapat memberikan pelayanan kepada peminat dan publik.

Selain sebagai metode dan sebagai penyedia sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 25). *Pertama*, dengan sifatnya kontemporer sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tak terbatas untuk menggali pelaku-pelakunya. *Kedua*, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Dengan demikian, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. *Ketiga*, sejarah lisan memungkinkan perluasan permasalahan sejarah karena sejarah tidak lagi dibatasi dengan adanya dokumen tertulis.

Apabila peneliti tidak melengkapi sumber tertulis, ia sebaiknya menggali informasi lisan yang diperoleh melalui wawancara. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pelaku sejarah yang masih hidup. Sebelum wawancara dilaksanakan ada baiknya peneliti membaca buku pedoman wawancara, kemudian membuat catatan mengenai siapa saja pelaku sejarah yang hendak di wawancarai. Langkah selanjutnya, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara. Sebelum bertanya sesuatu, ada baiknya jika peneliti sudah banyak membaca buku. Apakah wawancara cukup ditulis tangan atau direkam dengan alat perekam? Lebih baik, seandainya wawancara direkam dengan *tape recorder* atau alat perekam lainnya, karena semua informasi akan terekam. Meskipun tidak semua informasi yang terekam nantinya bisa dipakai sebagai sumber, tetapi bagi peneliti rekaman itu akan menjadi koleksi pribadi.

Dalam wawancara ada dua syarat yang harus dipenuhi peneliti. *Pertama*, harus dikuasai sungguh-sungguh bagaimana mengoperasikan alatperekam. Ada cara-cara tertentu bagaimana supaya suara-suara di luar tidak terdengar, bagaimana supaya suara lebih keras atau lebih lunak, di mana wawancara dilaksanakan, di dalam atau diluar ruangan, bagaimana mengatur supaya alat

perekam tidak mengganggu, bagaimana mengatur wawancara bersama-sama, atau beberapa keluarga menjadi satu.

Kedua, sebelum pergi wawancara belajarlah sebanyak-banyaknya. Hal itu akan membuat peneliti percaya diri. Jangan terlalu banyak bertanya, tapi juga jangan kehilangan bahan pertanyaan. Jangan ada kesan memaksa, pewawancara harus siap jadi pendengar. Pewawancara harus siap pertanyaan terurai, setidaknya ada daftar pertanyaan berupa *check list*. Sesampai di rumah, alat perekam harus diputar dan didengarkan lagi, lalu ditranskrip. Hasil transkrip dimintakan tanda tangan.

Untuk menghormati orang yang diwawancarai, peneliti harus menanyakan apa semua hasil wawancara bisa didengar orang. Ada wawancara yang rahasianya baru boleh dibuka ketika responden meninggal. Wawancara semacam itu, yang sifatnya konfidensial, biasanya disimpan ditempat yang aman, misalnya Arsip Nasional.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Apabila seorang sejarawan ingin menulis sejarah politik, tentang Sarekat Islam di Surakarta, 1911-1940. Seorang sejarawan tentu sudah belajar dari sumber sekunder mengenai dualisme kekuasaan, di satu pihak ada Belanda dan di lain pihak ada kekuasaan pribumi, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Birokrasi, pegawai, penduduk, kebudayaan dan kehidupan sehari-hari mengikuti dualisme itu.

Setelah peneliti mengetahuisecara persis topiknya dan sumber sudah dikumpulkan, tahap berikutnya adalah verifikasi ada dua macam : otentisitas atau kritik ekstrem dan kredibilitas atau kritik intern.

a. Otentisitas (Kritik Ekstern)

Jika seorang sejarawan menemukan sebuah surat, notulen rapat, dan daftar langganan majalah tertentu. Kertasnya sudah menguning, baik surat, notulen, atau daftar. Untuk membuktikan keaslian sumber, rasanya terlalu mengada-ada, sebab untuk apa orang memalsukan dokumen yang tak berharga itu? Surat, notulen, dan daftar itu harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autentisitasnya. Selain pada

dokumen tertulis, juga pada artefak, sumber lisan, dan sumber kuantitatif, harus dibuktikan ke asliannya.

Untuk mempermudah sejarawan melakukan kritik ekstern sebaiknya ia mengajukan pertanyaan (Basri, 2006:70):

- 1) Pertanyaan yang mengungkap tentang waktu sumber itu di buat “kapan sumber itu dibuat?” dalam hal ini peneliti harus menemukan tanggal sumber atau dokumen itu dibuat. Setelah tanggal itu dapat ditemukan lalu dihubungkan dengan materi sumber untuk mengetahui apakah ada anakronisme (tidak bertentangan dengan zaman). Misalnya, sebuah dokumen, diklaim sudah diketik pada awal abad ke-10, maka pengakuan itu tidak benar karena mesin ketik baru ditemukan pada abad 19.
- 2) Menyelidiki materi sumber, seperti: jenis kertas, jenis tinta, usia tinta, tanda tangan, stempel, gaya bahasa dan sebagainya.
- 3) Mengidentifikasi siapa pengarang, yang sebenarnya, dengan cara mengidentifikasi: kemiripan tulisan, jenis huruf yang sering dipakai, gaya bahasa atau penulisan, serta ciri-ciri tanda tangan pengarang.
- 4) Dengan mengajukan pertanyaan “dimana sumber itu dibuat?” Kegiatan ini berarti ingin memastikan tempat atau lokasi pembuatan sumber. Antara tempat pembuatan dengan tempat penyimpanan sumber, termasuk tempat terbit (jika diterbitkan) dapat saja berbeda. Misalnya, sebuah sumber (katakanlah sebuah karya ilmiah atau ensiklopedi), tempat pembuatannya di kota Bandung diterbitkan di salah satu penerbit di Jakarta, lalu di simpan dipergustakaan di berbagai kota di Indonesia. Jika bentuknya seperti ini, sampai kurun waktu tertentu tidak terlalu sulit untuk melacak dan mencarinya. Akan tetapi jika sumber itu milik swasta atau pribadi atau arsip Negara (rahasia) yang kebanyakan tidak dipublikasikan untuk umum, maka melacaknya cukup sulit, meskipun tetap harus dicari dan ditemukan.
- 5) Pertanyaan berikut ialah “ dari bahan apa sumber itu dibuat?” apakah terbuat dari kertas, daun (daun lontar), kulit binatang, kulit kayu, tulang, ukiran pada batu? Semua bahan-bahan yang di gunakan itu, akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses analisis selanjutnya karena masing-masing bahan memang pernah digunakan oleh manusia pada masa silam dalam kurun jaman tertentu. Sebelum bangsa Indonesia mengenal kertas misalnya, maka yang digunakan sebagai sarana komunikasi surat menyurat adalah

daun lontar. Bangsa mesir kuno, misalnya sejak 4000 SM telah mengenal huruf, mereka menulis di atas daun Papyrus (Koentjaraningrat, 1974: 22). Diawal munculnya agama Islam 571 M, penulisan wahyu banyak menggunakan pelepah daun kurma, kulit kayu, termasuk tulang.

b. Kredibilitas (Kritik Intern)

Apabila sejarawan sudah memutuskan bahwa suatu dokumen itu autentik, langkah selanjutnya ia harus meneliti apakah dokumen itu bisa dipercaya, misalnya, sejarawan ingin meneliti surat pengangkatan seseorang sebagai ketua koperasi batik, tahun itu ketua koperasinya lowong, orang itu adalah anggota Sarekat Islam. Melihat kredibilitas foto-misalnya foto ucapan selamat dalam upacara penyempahan-itu akan tampak dalam pertanyaan apakah waktu itu lazim ada ucapan selamat atas pengangkatan seseorang. Jika semuanya positif, tidak ada cara lain kecuali mengakui bahwa dokumen itu kredibel.

Pada prinsipnya, kritik intern bermaksud menggunakan isi kandungan sumber, yakni ingin mengetahui “apa” dan “bagaimana” isi kandungan tersebut. Selain itu untuk mengetahui tujuan pengarang menulis sumber tersebut, selain itu untuk mengetahui tujuan pengarang menulis sumber tersebut, setelah itu diajukan pertanyaan, “benarkah” itu tulisan pengarang dimaksud? Secara rinci kritik intern ini bertujuan mengungkap kredibilitas dan validitas sumber, menyelami alam pemikiran pengarang, kondisi mental atau kejujuran intelektual serta keyakinan (Basri: 2006: 72).

4. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi sering dianggap sebagai biang subjektivitas. Sebagian pendapat itu benar, tetapi sebagian salah. Dikatakan benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Oleh karena itu, subjektivitas penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu dua macam, yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995: 105).

Sebagai contoh interpretasi, akan dipakai sejarah kota. Meskipun sejarah kota itu macam-macam, bisa berupa sejarah pendidikan, sejarah kependudukan, sejarah kriminalitas, sejarah politik, sejarah birokrasi, sejarah ekonomi dan

sebagainya. Sejarah kota yang dimaksud akan mengambil periode yang amat penting, yaitu pembangunan kota sesudah revolusi. Jadi, judul tulisan itu kira-kira adalah "Masa rekonstruksi: Yogyakarta, 1950-1955".

Contoh lain lagi, apakah artinya tugu di tengah kota, tari bedaya, gamelan sekaten, dan lain sebagainya. Lingkungan manusia penuh dengan simbol-simbol yang menuntut interpretasi. Gejala itu hanya bisa dipahami lewat interpretasi dan tidak lewat eksplanasi kausal (Kartodirojo, 1992: 221).

a. Analisis

Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Misalnya, ditemukan daftar pengurus suatu ormas di kota. Menurut kelompok sosialnya, di situ ada petani, bertanah, pedagang, pegawai negeri, petani tak bertanah, orang swasta, guru, tukang, mandor, dapat disimpulkan bahwa ormas itu terbuka untuk semua orang. Jadi, ormas itu bukan khusus untuk petani bertanah, tetapi juga untuk petani tak bertanah, pedagang, pegawai negeri dan sebagainya. Mungkin soal petani bertanah dan tak bertanah harus dicari dengan cara lain, sebab dalam daftar pengurus tidak mungkin dicantumkan kekayaan, paling-paling pekerjaan. Setelah analisis itu ditemukan fakta bahwa pada tahun itu ormas tertentu bersifat terbuka berdasarkan data yang ada.

Ada informasi bahwa harga tanah naik, dapat ditemukan dari data-data kecamatan dalam kota. Setelah melalui analisis statistik atau melalui presentase biasa, ditemukan fakta bahwa harga tanah dalam kota naik. Dalam demografi dapat ditemukan bahwa secara total terjadi integrasi. Hal ini sesuai dengan data dari kecamatan dalam kota yang menunjukkan semakin banyak pendatang dari luar daerah.

b. Sintesis

Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data tentang pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang mengungsi, pengibaran dan penurunan bendera, ditemukan fakta bahwa, telah terjadi revolusi. Jadi, revolusi adalah hasil interpretasi setelah data-data dikelompokkan menjadi satu. "mengelompokkan" data itu hanya mungkin kalau peneliti punya konsep. Revolusi adalah, generalisasi konseptual yang diperoleh melalui pembacaan. Dalam interpretasi-baik analisis maupun sintesis-orang bisa berbeda pendapat. Perbedaan interpretasi itu sah, meskipun datanya sama.

Misalnya, dari pembacaan diketahui bahwa ada anggota laskar yang kemudian tidak menjadi tentara, proses ini disebut demobilisasi. Sesuai data yang terkumpul ternyata ada ketegangan antara profesionalisme dan amatirisme. Menurut data yang berhasil dikumpulkan tentang kriminalitas, ada jenis kriminalitas, yaitu *organized crime*, mungkin ini kelanjutan dari yang sebelumnya disebut *gerayak*. Sesuai data yang terkumpul tentang pertumbuhan pasar ditemukan fakta bahwa ada perluasan kota.

Kadang-kadang perbedaan antara analisis dan sintesis itu dapat diabaikan, sekalipun dua hal itu penting untuk proses berpikir. Sejarawan menyebutnya dengan interpretasi, atau analisis sejarah, tidak pernah menyebut sintesis sejarah. Sama halnya, orang selalu mengatakan analistik statistik untuk analisis dan sintesis.

Kadang-kadang antara data dan fakta hanya ada perbedaan bertingkat, jadi tidak kategoris. Seperti pekerjaan detektif, kalau yang dicari sebab kematian-dan bukan ada dan tidaknya pembunuhan-data tentang pisau yang berdarah sudah sangat dekat dengan fakta. Demikian pula bagi sejarawan, kalau yang dicari adanya rapat dan bukan revolusi. Data berupa notulen rapat sudah sangat dekat dengan fakta.

5. Historiografi (Penulisan)

Tahapan akhirdari sebuah penelitian ialah penulisan. Penulisan adalah puncak segala-galanya karena apa yang dituliskan itulah sejarah-yaitu *histoire-recite*, sejarah sebagaimana terjadinya. Suatu penelitian tanpa penulisan, kurang memiliki arti, sebaliknya suatu penulisan tanpa penelitian, tak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Maka kedua-duanya merupakan hal yang sama penting (Abdullah, et.al., eds., 1985: xiii). Hasil penulisan sejarah inilah yang disebut historiografi.

Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis atau kritis, yang berusaha sejauh mungkin mencari “kebenaran” historis dari setiap fakta, bermula dari suatu pertanyaan pokok. Bermula dari suatu pertanyaan pokok inilah, berbagai keharusan konseptual dilakukan dan bermacam proses pengerjaan penelitian dan penulisan dijalani. Dengan bahasa slogan, dapat dikatakan bahwa “tanpa pertanyaan, tak ada sejarah”.

Penulisan meliputi penguasaan ejaan, tata bahasa, tata tulis, konvensi, urutan-urutan bagian tulisan, susunan bibliografi dan lain sebagainya. Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian konsistensi mengikuti standar yang telah di sepakati. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting. Kalau dalam sosiologi “alur lurus” tidak menjadi masalah, tidak demikian dengan sejarah. Demikianlah, misalnya, seseorang akan meneliti, “Perubahan Sosial di Semarang, 1950-1990”.

Dalam penulisan sosiologi, angka tahun tidak penting, karena ilmu sosial biasanya berbicara masalah kontemporer. Dalam ilmu sosial, orang berpikir tentang sistematika dan tidak tentang kronologi. Misalnya, orang akan membagi bab dari yang besar ke yang kecil, atau dari yang luas ke yang sempit atau dari yang konkret ke yang abstrak atau sebaliknya. Dalam sumpah pemuda dikatakan secara sistematis, “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa”. Sumpah itu merunjuk tempat, penduduk, dan pengikat; jadi bergerak dari yang konkret ke yang abstrak.

Dalam ilmu sosial, perubahan akan dikerjakan dengan sistematika: perubahan ekonomi, perubahan masyarakat, perubahan politik, dan perubahan kebudayaan. Dalam sejarah perubahan sosial itu akan diurutkan kronologinya. Misalnya, penulisan itu akan tampak sebagai berikut: Semarang sekitar 1950, 1950-1960, 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990, dan Semarang sekitar 1990. Perubahan tiap-tiap dasawarsa dapat diukur dengan transportasi atau dengan ukuran lain. Misalnya, ternyata Semarang berubah dari daerah pejalan kaki, sepeda dan andong, sepeda motor, angkutan kol, dan bus kota dan antar kota. Kalau memakai ukuran yang lebih total, setiap periode harus ada “tenaga pendorong” (*driving force*) masing-masing. Misalnya, peranan pendidikan untuk periode pertama, peranan organisasi politik untuk periode ke dua, peranan politik untuk periode ketiga, dan peranan organisasi ekonomi untuk periode ke empat.

Format karya sejarah selain ditulis secara lugas, juga jelas, detail, kronologis, dan menggunakan gaya bahasa sastra sebagai bagian dari seni, selain itu pertimbangan-pertimbangan filosofis pun tidak boleh diabaikan, karena merupakan bagian dari filsafat (Maarif, 1985:13). Hal itu dimaksudkan agar sejarah lebih arif dan mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kuat sehingga sejarah bukan sekadar laporan peristiwa masa lalu manusia, tetapi benar-benar mempunyai makna filosofi bagi kehidupan manusia kini dan mendatang

(Gottschalk, 1986: 6). Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian (Kuntowijoyo, 1995: 107) (a) Pengantar; (b) Hasil Penelitian; dan (c) Kesimpulan.

a. *Pengantar*

Pengantar berisi tentang permasalahan, latar belakang (berupa lintasan sejarah), historiografi dan pendapat penulis tentang tulisan orang lain, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori, dan konsep yang dipakai serta sumber-sumber sejarah. Jangan lupa, pembaca akan melihat apakah pertanyaan yang dirumuskan peneliti sudah terjawab atau belum.

b. *Hasil Penelitian*

Dalam bab-bab inilah ditunjukkan kebolehan penulis dalam melakukan penelitian dan penyajian. Profesionalisme penulis tampak dalam pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu terletak dalam catatan dan lampiran. Setiap fakta yang ditulis harus disertai dengan data yang mendukung.

c. *Kesimpulan*

Dalam kesimpulan ini penulis mengemukakan generalisasi dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan alasan pentingnya penelitian. Isi kesimpulan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terkait secara substantif terhadap temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan dan dapat memperkaya temuan penelitian yang di peroleh.

Dalam kesimpulan, generalisasi penulis akan tampak apakah penulis melanjutkan, menerima, memberi catatan, atau menolak generalisasi yang sudah ada. Misalnya, Clifford Geertz dalam penelitiannya tentang Mojokuto dan Tabanan mencoba memberi catatan atas tipe ideal Weeber bahwa kaum reformis itu pembaru, dengan persetujuannya bahwa kaum reformis islam di Mojokuto adalah *homo economicus*, tetapi di Tabanan justru kaum bangsawanlah yang punya etika ekonomi. Demikian pula Lance Castle dalam penelitiannya tentang industri rokok di Kudus, memberi catatan bahwa orang-orang Islam kalah berani berspekulasi dengan pedagang Cina.

Penelitian Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah*, yang melukiskan konflik antara priyayi dengan orang kecil telah menolak generalisasi M.C. Ricklefs dalam *A History of Modern Indonesia* yang menggambarkan peristiwa itu sebagai konflik antara santri dengan abangan. Dalam penelitian sejarah Semarang, siapa tahu kalau kaum abangan, tradisionalis, dan mantan-priyayi juga memiliki etika ekonomi.

Sartono Kartodirdjo dalam penelitiannya tentang “Pemberontakan Petani di Banten, 1888”, telah “menemukan” petani dan ulama. Penelitian itu sungguh mempunyai makna sosial di tengah masyarakat yang didominasi oleh pegawai negeri (dulu oleh priyayi) dan ulama mengalami marginalisasi.

Apakah signifikansi sosial dari penelitian sejarah lokal? Dengan sejarah lokal orang tahu tahap sejarah yang sedang dijalani sehingga bisa membandingkan dengan daerah lain yang kurang lebih sama tingkat perkembangannya. Dengan demikian, unsur sejarah lokal bermakna karena dapat dihubungkan dengan konteks makro serta dapat dicakup dalam generalisasi, umpamanya, seberapa jauh suatu kasus lokal itu representatif bagi gejala umum tingkat nasional antara lain dalam rangka proses inovasi atau transformasi (Kartodirdjo, 1992:74). Proses ini biasanya membawa dampak, antara lain konflik sosial antara beberapa golongan elite. Mengenai proses semacam ini bukan tingkat kejadiannya yang penting, tetapi mengenai kualitas sama pentingnya.

Bagaimanapun juga, kesimpulan sebuah penelitian sejarah seringkali menghasilkan perspektif baru. Sejarawan dan pembaca sejarah memang mendambakan perspektif, namun pendekatan yang berbeda terhadap masa dan masalah yang sama tidak selalu menghasilkan pengertian yang mendalam (Frederick dan Soeroto, 2005:178). Persoalan yang muncul kemudian adalah pertentangan mengenai fakta-fakta dasar. Persoalan sejarah semacam ini umum dan wajar saja. Lebih sukar lagi kalau membahas kejadian yang amat penting atau tokoh termasyur. Contoh yang masih dekat adalah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan. Pada umumnya kejadian penting ini dianggap aman secara faktual dan diketahui secara sempurna sampai hal-hal yang paling kecil. Akan tetapi, kenyataan lain, saksi mata serta peserta utama pada kejadian 17 Agustus 1945 itu bahkan tidak sependapat mengenai apa dan mengapa terjadi demikian.

Selanjutnya, perhitungan dua tokoh penting mengenai kelahiran proklamasi. Keduanya jelas sekali tidak sependapat dalam beberapa hal pokok. Apakah timbulnya persoalan semacam ini mengurangi arti pentingnya proklamasi? Meskipun seluk beluk suatu kejadian kurang jelas sesudah dilakukan, namun, kekurangjelasan itu tidak mengurangi pentingnya kejadian itu sebagai kejadian. Tugas ahli sejarah serta pembaca sejarah, jika dihadapkan persoalan semacam ini, adalah mencari alasan-alasan yang menyebabkan para saksi itu berbeda, termasuk dalam hal fakta-fakta dasar. Metode sejarah membantu sejarawan untuk memeriksa semua sumber dan bukti yang ada, sampai jumlah kemungkinan-kemungkinan makin dipersempit dan makin mendekati kebenaran.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

1. Aktivitas individu, meliputi:
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyesuaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi:
 - a. Mendiskusikan materi pelatihan
 - b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan
 - c. Penyelesaian masalah/kasus

E. LATIHAN/TUGAS/KASUS

LK 1

Kerjakan secara berkelompok!

1. Jelaskan jenis-jenis penelitian sejarah!
2. Susunlah tahapan penelitian sejarah!

LK 2

Kerjakan secara individu

No	Istilah	Penjelasan	Contoh
1	Kritik ektern		
2	Kritik Intern		

F. RANGKUMAN

1. Sejarah merupakan ilmu karena sejarah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Objek
 - b. Tujuan
 - c. Metode
 - d. Kegunaan
 - e. Sistematika
 - f. Kebenaran
 - g. Generalisasi
 - h. Prediksi
2. Tahap-Tahap dalam Penelitian Sejarah
 - 1) Pemilihan masalah penelitian dan penentuan topik;
 - 2) Pengumpulan sumber (heuristik);
 - 3) Verifikasi (Kritik sumber);
 - 4) Interpretasi: analisis dan sintesis;
 - 5) Penulisan (Historiografi)

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi metodologi dan historiografi?
2. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

SEJARAH LOKAL

DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan perkembangan sejarah lokal serta implementasinya dalam pembelajaran di SMA untuk mata pelajaran sejarah, dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan makna dan hakekat sejarah lokal
2. Menganalisis pengintegrasian sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di Indonesia
3. Menganalisis penerapan sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di Indonesia

C. URAIAN MATERI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sejarah Lokal

Sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu konstruk yang menggambarkan pengalaman kolektif suatu kelompok dalam suatu sintesis. Konstruk itu merupakan suatu kebulatan atau suatu sistem. Oleh karena itu, pemilihan suatu topik atau tema berkisar sekitar peristiwa atau gejala sejarah yang dilukiskan sebagai suatu unit. Setiap unit senantiasa memiliki ruang lingkup temporal dan spasial (Sartono Kartodirdjo, 1993:72). Salah satu unit sejarah yang ada ialah sejarah lokal. Untuk lebih mengetahui sosok dari unit sejarah ini, langkah awal adalah dengan memahami pengertian, ruang lingkup, dan arti penting kajiannya.

Berbicara arti penting dari sejarah lokal pastilah kaitannya dengan suatu hubungan atau peran serta dari sejarah Lokal terhadap keberlangsungan Sejarah nasional. Antara sejarah lokal dan Nasional sangatlah berhubungan. Dengan melakukan penelitian tentang sejarah lokal, kita tidak hanya memperkaya pembendaharaan sejarah Nasional, tapi lebih penting lagi

memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara lebih intim. Dengan begini kita makin menyadari pula bahwa ada berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungannya dan dengan sejarahnya. Selanjutnya pengenalan yang memperdalam pula kesadaran sejarah Kita. Yaitu kita diberi kemungkinan untuk mendapatkan makna dari berbagai peristiwa sejarah yang dilalui.

Mendiskusikan mengenai pengertian dan ruang lingkup sejarah lokal, Widja (1991:1-14) memberikan beberapa uraian. Merujuk pada pendapat Onghokham (1981) yang menyatakan bahwa sejarah lokal sudah lama berkembang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan bila sejarah lokal diartikan sebagai sejarah daerah tertentu. Bahkan sejarah yang kita miliki sekarang bermula dari sejarah lokal. Berbagai sejarah daerah dapat dihubungkan dengan nama-nama tradisional seperti babad, tambo, riwayat, hikayat, dan sebagainya, yang dengan cara-cara yang khas (magis-mistis) menguraikan asal-usul suatu daerah tertentu.

Abdurrahman Surjomihardjo (1983:116) berpendapat bahwa suatu karya sejarah sebagai sejarah lokal apabila di dalamnya diuraikan peristiwa-peristiwa dalam suatu desa atau beberapa desa, kota kecamatan, kota kawedanan atau kota lain (tidak termasuk di dalamnya kota pelabuhan besar atau ibukota negara). Termasuk di dalamnya adat istiadat lokal, kebiasaan kebudayaan (cara mengolah tanah, jenis kualitas tanaman, bentuk alat-alat produksi, masa pengolahan sawah dan hutan) dan kebiasaan sosial ekonomi, aturan keagamaan dan kepercayaan di dalam batas-batas wilayah hukum dan administrasi yang sama.

Taufik Abdullah (1990:13-15) menguraikan tentang pengertian sejarah lokal dengan terlebih dulu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap istilah sejarah daerah. Sebuah istilah yang di Indonesia mendapat tempat yang sejajar dengan istilah sejarah lokal. Terkadang juga kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian tanpa penjelasan yang tegas. Sebagai bukti bahwa istilah sejarah daerah mendapat tempat adalah digunakannya istilah ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Proyek Penulisan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 1977/1978. Berkait dengan hal tersebut, sejarawan Taufik Abdullah mengajukan keberatannya. Menurutnya kata "sejarah daerah" harus ditinjau lebih sungguh-sungguh. Daerah dalam pengertian administratif merupakan kesatuan

teritorial yang ditentukan jenjang hirarkinya. Daerah yang berada di bawah merupakan bagian dari daerah di atasnya. Sebagai contoh, kabupaten merupakan daerah di bawah yang menjadi bagian dari daerah di atasnya yang disebut dengan propinsi. Sedangkan kata “daerah” dalam pengertian politik biasanya dipertentangkan dengan kata “pusat” yang dianggap nasional. Keberatan terhadap penggunaan istilah sejarah daerah adalah karena daerah sebagai unit administratif kerap berbeda dengan daerah dalam pengertian etnis-kultural. Sebagai contoh, “Sejarah Minangkabau” tidak identik dengan “Sejarah Sumatera Barat”. Yang disebut pertama adalah konsep etnis-kultural, sedangkan yang kedua menunjuk pada pengertian administratif.

Istilah lain, yaitu sejarah regional, juga tidak disetujuinya. Pengertian “regional” yang kini lebih populer adalah melampaui batas politik nasional, misalnya konsep ASEAN. Atau dapat pula berarti suatu wilayah yang dibatasi untuk kebutuhan tertentu, misalnya “wilayah pembangunan” yang dikembangkan oleh BAPPENAS. Oleh karena itu, penggunaan istilah “sejarah tradisional” kurang tepat. Menurut Taufik Abdullah (1990:13-15) yang paling tepat adalah istilah “sejarah lokal”. Kata “lokal” tidak mengandung pengertian yang berbelit-belit, yaitu hanyalah “tempat” atau “ruang”. Jadi, sejarah lokal adalah sejarah dari suatu tempat, suatu *locality*, yang batasannya ditentukan oleh kesepakatan yang diajukan penulis sejarah. Batasan geografisnya dapat berupa tempat tinggal suatu suku bangsa yang meliputi dua atau tiga daerah administratif tingkat dua atau tingkat satu, dapat pula suatu kota, bahkan suatu desa. Secara sederhana, sejarah lokal dapat dirumuskan sebagai kisah masa lampau dari suatu kelompok atau masyarakat yang berada pada daerah geografis yang terbatas.

Adapun ruang lingkup sejarah lokal ialah keseluruhan lingkungan sekitar yang bisa berupa kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota, atau kesatuan wilayah lain seukuran itu beserta unsur-unsur institusi sosial dan budaya yang berada lingkungan tersebut, seperti: keluarga, pola pemukiman, mobilitas penduduk, kegotong-royongan, pasar, teknologi pertanian, lembaga pemerintahan setempat, monumen, perkumpulan kesenian, dan lain-lain (Widja, 1991:14-15).

2. Pentingnya Kajian Sejarah Lokal

Khusus untuk sejarah lokal, Lopian mengemukakan tiga arti penting kajian sejarah ini (Lopian dalam Widja 1991:17-19). Pertama, dikemukakan bahwa penulisan sejarah yang bersifat nasional seperti sekarang ini, seringkali kurang bermakna bagi orang-orang tertentu, terutama yang menyangkut sejarah wilayahnya sendiri. Banyak bagian dari sejarah bangsa Indonesia, yang bukan saja tidak pernah dibayangkan, tapi juga kurang dihayati dengan baik karena kurangnya pengetahuan mengenai latar belakang dari berbagai peristiwa yang memang penggambarannya sangat umum. Atau bisa juga karena peristiwa-peristiwa tersebut sama sekali tidak pernah diketahui. Sebagai contoh adalah ketidaktahuan orang-orang, bahkan yang berasal dari daerah itu sendiri, tentang peranan dan perkembangan kerajaan-kerajaan seperti, Aceh, Deli, Banten, Banjar, Bima, Bone, dan lain-lain. Dalam konteks ini, arti penting kajian sejarah lokal adalah untuk mengenal peristiwa-peristiwa sejarah di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna.

Kedua, dikemukakan bahwa arti penting dari kajian sejarah lokal adalah untuk melakukan koreksi terhadap generalisasi-generalisasi dalam penulisan sejarah nasional. Sebagai contoh, yaitu generalisasi periodisasi sejarah Indonesia yang salah-satunya adalah yang disebut dengan zaman Hindu. Daerah-daerah tertentu tidak mengenal zaman ini, misalnya seperti; Sangir, Talaud, Sewu, dan Rote. Sebaliknya, ada pula daerah-daerah yang hingga kini masih memeluk Hinduisme, seperti Bali dan sebagian Lombok. Contoh lain, yaitu generalisasi tentang dualisme perkembangan teknologi di Indonesia yang membedakan antara teknologi tradisional yang padat karya dengan teknologi modern yang padat modal yang dianggap tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia, utamanya di luar Jawa. Disebut juga generalisasi tentang involusi pertanian yang akan menimbulkan persoalan kalau diterapkan di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, pengembangan penulisan sejarah lokal dapat memberikan bahan-bahan untuk meninjau ulang teori-teori yang menggeneralisasikan masalah-masalah untuk seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, dikemukakan bahwa arti penting dari kajian sejarah lokal adalah untuk memperluas pandangan tentang dunia Indonesia agar tumbuh saling pengertian di antara kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia dengan cara meningkatkan pengetahuan kesejarahan dari masing-masing kelompok

terhadap kelompok lainnya. Arti penting ini dapat mengikis ketidaktahuan yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya, banyak yang tidak tahu bahwa tatkala di Jawa, Belanda sibuk menghadapi Jepang, di Tarakan dan Minahasa penduduk telah disuruh menyanyi lagu kebangsaan Nippon, sementara di Gorontalo dan Aceh merah putih telah berkibar. Ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tentara sekutu menduduki Jayapura, Biak, Morotai, dan Kalimantan Timur.

Pandangan menarik tentang pentingnya penulisan sejarah lokal disampaikan oleh Taufik Abdullah. Ia menyatakan bahwa penulisan sejarah lokal merupakan salah-satu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan kearifan yang telah hilang. Meskipun sejarah nasional dan sejarah lokal memiliki kategori unit sejarah sendiri-sendiri, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada keterkaitan antara peristiwa dalam konteks nasional dengan konteks lokal. Keterkaitan ini bukan berarti bahwa sejarah nasional adalah semata-mata gabungan dari sejarah-sejarah di tingkat lokal, namun harus dilakukan penelitian sejarah lokal di daerah-daerah tersebut sehingga kita benar-benar tahu peran serta refleksinya dalam perspektif nasional.

Kesimpulannya, sejarah nasional tekanan utamanya diberikan pada gambaran yang lebih luas serta menyeluruh dari suatu lingkungan bangsa dengan tidak terlalu memperhatikan detail-detail peristiwa lokal. Sedangkan dalam sejarah lokal, yang menjadi perhatian utamanya justru peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar suatu lokalitas sebagai suatu kebulatan, dan menempatkan sejarah nasional sebagai latar belakang dari peristiwa-peristiwa khusus lokalitas tersebut (Widja, 1991 : 40).

3. Sejarah Lokal dalam Pembelajaran Sejarah

a. Hakekat Pengajaran Sejarah

Pengajaran terdiri dari proses belajar dan mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen seperti: tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi. Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua komponen diorganisasikan sehingga

terjadi kerja sama antar-komponen (Syaiful B. Djamarah & Aswan Zain, 1996:10). Menurut Mursell (1975:28), pengajaran adalah suatu usaha mengordinasikan proses belajar.

Secara sederhana, pengajaran sejarah diartikan sebagai suatu sistem belajar mengajar sejarah. Pengajaran sejarah berkaitan dengan teori-teori kesejarahan. Berbeda dengan ilmu sejarah, pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah memang tidak secara khusus bertujuan untuk memajukan ilmu atau untuk menelorkan calon ahli sejarah, karena penekanannya dalam pengajaran sejarah tetap terkait dengan tujuan pendidikan pada umumnya yaitu ikut membangun kepribadian dan sikap mental siswa. Sutrisno Kuntoyo (1985 :46) menyatakan bahwa kesadaran sejarah paling efektif diajarkan melalui pendidikan formal. Hamid Hasan berpendapat, terdapat beberapa pemaknaan terhadap pendidikan sejarah. *Pertama*, secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan tersebut. *Kedua*, pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (*historical issues-analysis and decision making*) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah (Hasan Hamid, 2007: 7).

I Gde Widja (1989: 23) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Pendapat I Gde Widya tersebut dapat disimpulkan jika mata pelajaran sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada umumnya.

Dalam Seminar Sejarah Nasional di Yogyakarta tahun 1957, Padmospito berpendapat bahwa *pertama*, penyusunan pelajaran sejarah harus bersifat ilmiah. *Kedua*, siswa perlu bimbangan dalam berfikir tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh dipaksakan, karena dapat mematikan daya pikir siswa

(Sidi Gasalba, 1966:169). Dalam bidang pengajaran sejarah, terdapat tiga faktor yang harus dipahami tentang materi sejarah. *Pertama*, hakekat fakta sejarah. *Kedua*, hakekat penjelasan dalam sejarah. *Ketiga*, masalah obyektivitas sejarah (Burston dalam Haryono, 1995:12).

Peran pendidikan sejarah dalam pembentukan sikap nasionalisme guna mengantisipasi tantangan global dan berbagai gejolak disintegrasi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini sangat dibutuhkan, hal ini mengingat pengalaman sejarah membuktikan sikap nasionalisme mampu membangkitkan dinamika sosial di masa lalu. Sikap nasionalisme yang dimiliki rakyat Indonesia telah mampu menghantarkan bangsa menuju kemerdekaan di tengah keterbelakangan pengetahuan rakyat Indonesia dan kuatnya persenjataan penjajah, dalam konteks saat itu. Namun saat ini peran pendidikan sejarah patut dipertanyakan, sikap nasionalisme yang dimiliki bangsa menunjukkan kerapuhan. Konflik antar suku dan agama karena perbedaan nilai, dan upaya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bukti bahwa kesatuan nasional masih rapuh (Ibnu Hizam:2007:288).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan terkait materi dan tujuan dari pembelajaran sejarah maka mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara umum materi sejarah:

- (1) mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;
- (2) memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan;
- (3) menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa;

- (4) sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;
- (5) berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup

Atas dasar hal tersebut, maka sejarah diberikan kepada seluruh siswa di sekolah dari tingkat dasar (SD dan sederajat) sampai tingkat menengah (SMA dan sederajat) dalam bentuk mata pelajaran. Kedudukannya yang penting dan strategis dalam pembangunan watak bangsa merupakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata pelajaran lainnya. Meskipun demikian, terkait dengan materi sejarah dari tingkat dasar sampai menengah, Taufik Abdullah berpendapat agar siswa tidak bosan menerima materi sejarah, maka jika secara faktual yang disampaikan sama namun dalam setiap jenjang pendidikan, peristiwa tersebut akan tampil pada tingkat pengetahuan, pemahaman, serta pemberian keterangan sejarah yang semakin tinggi dan kompleks. Dengan demikian, setiap tingkatan atau tahap diharapkan bisa memberikan kesegaran dan kematangan intelektual (Taufik Abdullah, 1996: 10).

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah tidak mengkhususkan mempelajari fakta-fakta dalam sejarah sebagai ilmu namun perpaduan antara sejarah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Meski demikian, pembelajaran sejarah berusaha menampilkan fakta sejarah secara obyektif meskipun tetap dalam kerangka fakta sejarah yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

b. Permasalahan Ilmu Sejarah dalam Pengajaran Sejarah

Sejarah sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu dan sejarah sebagai ilmu, harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satunya atau keduanya. Hal tersebut penting, agar kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah. Sebagaimana pandangan Taufik Abdullah (1996: 8) bahwa sejarah sebagai alat pemupuk ideologi, betapapun luhurnya mempunyai resiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan. Pemisahan kurikulum antara sejarah "*kognitif*" (pengetahuan) dengan yang "*afektif*" (perasaan) yang pernah dilakukan, bukan

saja artifisial, tetapi juga memperlihatkan kemandulan dalam pemikiran kesejarahan. Seakan-akan, sejarah yang diketahui tidak bertolak dari keingintahuan yang subyektif, demi didapatkan kearifan yang afektif.

Mengutip pernyataan dari Elton, sering muncul kecurigaan di kalangan sejarawan bahkan para pendidik, terhadap alasan mengkaitkan sejarah dengan proses pendidikan. Proses pendidikan sejarah dianggap hanya menjadi sumber kecenderungan etnosentris bahkan mengarah ke "*xenophobia*". Sementara itu, Namier berpendapat bahwa peran sejarah sebagai "*moral precepts*" atau ajaran moral dianggap dapat menjelma menjadi indoktrinasi sebagai legitimasi doktrin atau ideologi tertentu (Elton dalam I Gde Widja, 1997:174).

Selain itu, Mahasin berpandangan bahwa kritik umum kepada pendukung nilai edukatif sejarah dalam penanaman nilai-nilai sejarah melalui proses pendidikan yang lebih menonjol adalah pencapaian tujuan-tujuan edukatif yang bersifat *ekstrinsik* atau *instrumental*. Padahal dalam teori belajar yang lebih utama adalah nilai *instrinsik*. Penekanan sifat *ekstrinsik* atau *instrumental* dalam pendidikan sejarah akan lebih mengarah pada pemahaman nilai sejarah sebagai landasan bagi pembentukan semacam alat cetak membentuk manusia yang sudah ditentukan sebelumnya (*predefined person*) baik dalam rangka "*cultural transmission*" maupun dalam penyiapan "*moral precepts*" bagi generasi baru. Dalam kerangka berpikir seperti ini, muncul kecenderungan atau dorongan pemujaan berlebihan terhadap masa lampau yang pada gilirannya memberi peluang bagi kekaburan realitas sejarah demi kepentingan masa kini atau kecenderungan *presentisme*. Pengaburan seperti ini bisa mendorong generasi baru hanya terpesona atau mengagumi masa lampau tanpa pernah berpikir secara kreatif merencanakan bangunan masa depannya (Mahasin dalam I Gde Widja, 1997:176).

Menurut Taufik Abdullah (1996: 11) jika disimpulkan, sejarah sebagai wacana intelektual akan tampil secara bertahap dengan berbagai wajah. *Pertama*, sebagai sejarah yang bernada moralistik, yang merupakan pertanggungjawaban rasional akan keharusan hidup bermasyarakat. *Kedua*, sejarah sebagai alat pengetahuan praktis, yaitu sebagai kaca pembanding untuk mengetahui struktur hari dan dunia kini dan *ketiga*, sejarah sebagai pembimbing kearah pemahaman, yaitu sebagai alat dan penolong untuk memungkinkan

terjadinya dialog yang kreatif dengan pergolakan jaman yang melintas dalam pengalaman hidupnya atau alat untuk memahami dunia *intelligently*.

Sebagai jalan tengah memahami permasalahan di atas, perlu ditekankan strategi dasar berupa penanaman nilai yang *dinamis progresif*. Dalam perspektif ini, apabila dalam proses belajar-mengajar sejarah tidak bisa dihindarkan mengajak siswa untuk mengambil nilai-nilai dari masa lampau, bukanlah dimaksudkan agar siswa terpaku dan terpesona pada kegemilangan masa lampau. Nilai-nilai masa lampau diperlukan untuk menjadi kekuatan motivasi menghadapi tantangan masa depan (I Gde Widja, 1997: 183).

Sejarah sebagai ilmu mengandung syarat-syarat ilmiah yang harus dipenuhi sebagai disiplin ilmu tertentu. Persepsi tentang sejarah harus jelas bagi guru yang mengajarkan sejarah sebagai mata pelajaran. Tujuan sejarah berbeda dengan tujuan pengajaran sejarah. Tujuan sejarah dapat bersifat filosofis, tetapi pengajaran sejarah mempunyai tujuan tertentu dalam rangka pendidikan atau bersifat didaktis. Harus disadari bahwa mata pelajaran-mata pelajaran tidak harus bersifat ilmu murni, apalagi untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Mata pelajaran sebagai alat mengabdikan kepada tujuan pendidikan yang multi-aspek. Meskipun demikian, sejarah sebagai mata pelajaran tidak mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan, konsep dasar dan prinsip keilmuan (Siswanto dan Sukanto, 1991: 22-23).

c. Tujuan Pembelajaran Sejarah

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa pembelajaran sejarah merupakan perpaduan antara pembelajaran itu sendiri dan ilmu sejarah, yang mana keduanya tetap memperhatikan tujuan pendidikan secara umum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pendidikan berpendapat tentang tujuan dari mata pelajaran sejarah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, bahwa mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- (1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan
- (2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan

- (3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau
- (4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang
- (5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Pengajaran sejarah penting dalam pembentukan jiwa patriotisme dan rasa kebangsaan. Suatu pengetahuan sejarah yang ditunjang pengalaman praktis warga negara yang baik di sekolah membantu memperkuat loyalitas dan membantu anak-anak menemukan dirinya dengan latar belakang sejarah luas (Jarolimek, 1971: 221). Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental (Sartono Kartodirdjo, 1993:247).

Menurut Hamid Hasan dalam Kongres Nasional Sejarah tahun 1996, secara tradisional tujuan kurikulum pendidikan sejarah selalu diasosiasikan dengan tiga pandangan yaitu:

- (1) "*perennialisme*" yang memandang bahwa pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagai wahana "*transmission of culture*". Pengajaran sejarah hendaklah diajarkan sebagai pengetahuan yang dapat membawa siswa kepada penghargaan yang tinggi terhadap "*the glorius past*". Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk mampu menghargai hasil karya agung bangsa di masa lampau, memupuk rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional.
- (2) *esensialisme*, menurut pandangan ini, kurikulum sejarah haruslah mengembangkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan disiplin ilmu dan bukan hanya terbatas pada pendidikan pengetahuan sejarah. Dalam pandangan aliran *esensialisme*, siswa yang belajar sejarah harus diasah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi intelektual sejarah sebagai disiplin ilmu. Kemampuan

intelektual keilmuan antara lain menghendaki kemampuan berfikir kritis dan analitis terutama dikaitkan dalam konteks berfikir yang didasarkan filsafat keilmuan.

- (3) rekonstruksi sosial, pandangan ini menganggap bahwa kurikulum pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada kajian yang mengangkut kehidupan masa kini dengan problema masa kini. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa mengkaji masalah untuk memecahkan permasalahan. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam sejarah masa lampau sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini (Hamid Hasan , 1997:138-139).

Namun klasifikasi seperti pandangan di atas tidak perlu dijadikan pegangan mutlak dan terpisah oleh para pengembang kurikulum sejarah. Sebagai wahana pendidikan, kurikulum sejarah harus diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pengembangan rasa kebangsaan, kebanggan atas prestasi gemilang masa lalu bangsa, mampu menarik pelajaran dari peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang (Hamid Hasan , 1997:139).

Hal yang wajar terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami kenyataan sosial termasuk dalam masalah sejarah. Hal ini juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah (1996:5) bahwa sejarah sebagai ingatan kolektif memberikan keprihatinan sosial-kultural akan hasrat peneguhan integrasi. Dalam konteks ini, tercaburlah batas-batas antara “ kepastian sejarah” dengan “ kewajaran sejarah” , antara “ apa yang sesungguhnya telah terjadi” dan “ apa yang semestinya harus terjadi”. Ungkapan lain untuk menjelaskan hal tersebut adalah terbaurlah hasil rekonstruksi kritis terhadap sumber sejarah dengan keinginan akan masa lalu sebagai landasan kearifan masa kini.

Namun usaha untuk menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi ataupun sebagai landasan nilai merupakan hal yang sah, baik secara akademis maupun secara etis (Taufik Abudullah,1996: 7). Pengajaran sejarah lebih bersifat “ *confluent*” artinya dapat untuk mengembangkan berbagai ranah sekaligus. Ranah kognisi, afeksi dan konasi secara bersama-sama membentuk “ sikap keseluruhan”. Aspek kognisi merupakan penggerak perubahan karena informasi

yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk bertindak. Kognisi yang salah akan menimbulkan afeksi dan konasi yang salah pula. Afeksi dan konasi yang benar hanya dapat dihasilkan oleh kognasi yang benar (Mar'at, 1982 : 13). Ini berarti bahwa pengajaran sejarah yang salah akan menimbulkan sikap yang salah, palsu atau munafik. Bila salah, maka tindakan lahirnya juga menghasilkan tindakan yang salah (Moedjanto, 1985: 6).

Berfokus pada fungsi pengajaran sejarah untuk meningkatkan proses penyadaran diri, maka dua aspek didaktik sejarah perlu ditonjolkan yaitu (1) segi teknik penyampaian atau metodenya dan (2) segi substansialnya atau silabus. Kedua aspek terdapat pengaruh timbal balik, keduanya bertalian dengan usia serta tingkat pendidikan anak didik. Prinsip pemilihan substansi dalam didaktik sejarah adalah (Sartono Kartodirdjo, 1993:254-257):

- (1) pendekatan secara lokosentris, mulai dengan mengenal lokasi sejarah di sekitarnya
- (2) pendekatan konsentris, mulai lingkungan dekat meluas ke lingkup nasional terus ke yang internasional
- (3) temasentris yaitu pilihan tema tertentu yang menarik sekitar pahlawan atau monumen, dan lain sebagainya
- (4) kronologi: urutan kejadian menurut waktu
- (5) tingkatan presentasi dari deskriptif-naratif ke deskriptif-analitis, mulai dari cerita tentang “ bagaimana” terjadinya, sampai pada “mengapa”-nya
- (6) sejarah garis besar dan menyeluruh

Inti pembelajaran sejarah adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap bangsa, jati diri dan budi pekerti kepada anak didik. Buku pelajaran sejarah hendaknya disusun dengan ketentuan-ketentuan ilmiah yang berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional (Hugiono & Poerwantana, 1987:90). Melalui proses belajar sejarah bukan semata-mata menghafal fakta, siswa dapat mengenal kehidupan bangsanya secara lebih baik dan mempersiapkan kehidupan pribadi dan bangsanya yang lebih siap untuk jangka selanjutnya (Hamid Hasan, 1997:141). Sementara itu, Krug (1967:22) berpendapat bahwa pengajaran sejarah bangsa merupakan upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan nasional dan untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan jiwa patriotik. Sedangkan Sartono Kartodirdjo (1993:258) menyatakan

peranan strategis pengajaran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa menuntut suatu penyelenggaraan pengajaran sejarah sebagai pemahaman dan penyadaran, sehingga mampu membangkitkan semangat pengabdian yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab serta kewajiban. Kepekaannya terhadap sejarah akan melahirkan aspirasi dan inspirasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara.

Tujuan mempelajari sejarah tidaklah sama dengan tujuan sejarah, menyangkut persoalan didaktis dan juga filsafat. Tujuan pelajaran sejarah merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Sejarah sebagai bahan pelajaran harus disusun searah dengan dasar dan tujuan Pendidikan Nasional (Hugiono & Poerwantana,1987:88). Anak didik harus mampu menemukan nilai-nilai yang ada pada materi sejarah yang dipelajarinya dan mampu merekonstruksi hubungan antar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran sejarah tersebut, baik dalam konteks hubungan antar nilai-nilai yang terdapat dalam materi sejarah yang disampaikan secara parsial maupun hubungannya dengan nilai-nilai yang terjadi saat ini. Sebab pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya untuk diketahui, tetapi diharapkan dapat dipakai untuk memperbaiki usaha-usaha di masa mendatang (Imam Barnadib: 1973:45).

Sejarahlah yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi generasi muda dengan pengungkapan model-model tokoh sejarah dan pelbagai bidang. Maka dari itu, sejarah masih relevan untuk dipakai menjadi perbendaharaan suri-auladan, berkorban untuk tanah air, berdedikasi tinggi dalam pengabdian, tanggung jawab sosial besar, kewajiban serta keterlibatan penuh dalam hal-hal bangsa dan tanah air. Sartono Kartodirdjo (Sartono Kartodirdjo, 1993b:247) berpendapat bahwa pembelajaran sejarah berkedudukan sangat strategis dalam pendidikan nasional sebagai “soko guru” dalam pembangunan bangsa. Pembelajaran sejarah perlu disempurnakan agar dapat berfungsi secara lebih efektif, yaitu penyadaran warga negara dalam melaksanakan tugas kewajibannya dalam rangka pembangunan nasional.

Tujuan pelajaran Sejarah Nasional ialah (a) membangkitkan, mengembangkan, serta memelihara semangat kebangsaan; (b) membangkitkan hasrat mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam segala lapangan; (c) membangkitkan hasrat mempelajari sejarah kebangsaan dan mempelajarinya

sebagai bagian dari sejarah dunia; (d) menyadarkan anak tentang cita-cita nasional untuk mewujudkan cita-cita itu sepanjang masa (Moh. Ali, 2005:178).

Menurut Wahid Siswoyo dalam bukunya “Seminar Sejarah” yang dikutip oleh Hugiono & Poerwantana (1987:7), dikemukakan beberapa hal, antara lain:

- (1) Sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme.
- (2) Sejarah yang mempunyai fungsi pedagogis serta merupakan alat bagi pendidikan membutuhkan pedoman atau pegangan yang dapat digunakan untuk mencapai cita- cita Pendidikan Nasional.

Melalui pendidikan sejarah yakni dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, proses sosialisasi sikap nasionalisme dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terencana, yaitu melalui proses internalisasi. Proses internalisasi merupakan proses untuk menjadikan suatu sikap sebagai bagian dari kepribadian seseorang. Dalam upaya mensosialisasikan sikap nasionalisme, strategi belajar mengajar pendidikan sejarah dilakukan melalui tahap pengenalan dan pemahaman, tahap penerimaan, dan tahap pengintegrasian (Ibnu Hizam: 2007:289).

d. Pengembangan Materi Sejarah Lokal

Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan (*treatment*) terhadap materi pembelajaran tersebut. Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas persiapan tersebut.

Dick and Carrey (1990) menyarankan ada tiga pola yang dapat diikuti oleh pengajar untuk merancang atau menyampaikan pembelajaran, yaitu sebagai berikut: (1) pengajar merancang bahan pembelajaran individual, semua tahap pembelajaran dimasukkan ke dalam bahan, kecuali pretes dan pascates, (2) pengajar memilih dan mengubah bahan yang ada agar sesuai dengan strategi pembelajaran. Peran pengajar akan bertambah dalam menyampaikan pembelajaran. Beberapa bahan mungkin saja disampaikan tanpa bantuan

pengajar, jika tidak ada pengajar harus memberi penjelasan, (3) pengajar tidak memakai bahan, tetapi menyampaikan semua pembelajaran menurut strategi pembelajarannya yang telah disusunnya. Pengajar menggunakan strategi pembelajarannya sebagai pedoman termasuk latihan dan kegiatan kelompok.

Kebaikan dari strategi ini adalah pengajar dapat dengan segera memperbaiki dan memperbarui pembelajaran bila terjadi perubahan isi. Adapun kerugiannya adalah sebagian besar waktu tersita untuk menyampaikan informasi, sehingga sedikit sekali waktu untuk membantu anak didik. Untuk keperluan program pengembangan mata pelajaran, khususnya materi pembelajarannya dipilih dari beberapa buku yang sesuai dengan keperluan pembelajaran (Hamzah B. Uno, 2006: 31).

Pelajaran sejarah merupakan hal yang fundamental tidak hanya dalam kaitannya dengan pembangunan kepribadian nasional, identitas dan jati diri bangsa, tetapi juga dalam konteks pembangunan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sebagaimana yang menjadi sasaran umum dalam pembangunan (Djoko Suryo, 1993: 1). Oleh karena itu guru sejarah dituntut inovatif dan kreatif mampu menguasai dan mengembangkan materi, serta menerapkan berbagai variasi metode dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dirumuskan.

Istilah pengembangan menunjuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru dimana selama kegiatan tersebut berlangsung, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan (Depdikbud, 1997:16). Pengembangan merupakan suatu kegiatan berupa perancangan, perencanaan atau rekayasa yang dilakukan dengan berdasarkan metode berfikir ilmiah guna memecahkan permasalahan yang nyata-nyata terjadi sehingga hasil kerja pengembangan berupa pengembangan ilmiah dan teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah (Depdikbud, 1998: 4). Dalam dunia pendidikan, setiap pengembangan selalu berdasarkan pada beberapa landasan. Beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum termasuk di dalamnya pengembangan bahan pengajaran, adalah landasan filosofis dan psikologis (Sukmadinata, 1997: 38-56).

Landasan filosofis berintikan bahwa interaksi antar manusia, terutama pendidik dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang dinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut

berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar dan esensial yaitu jawaban-jawaban filosofis.

Landasan psikologis berintikan bahwa proses pendidikan terjadi interaksi antar individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan antar peserta didik dengan orang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Manusia berbeda dengan benda atau tanaman, karena benda atau tanaman tidak mempunyai aspek-aspek psikologis. Manusia berbeda dengan binatang karena kondisi psikologis manusia jauh lebih tinggi tarafnya dan lebih kompleks dibanding dengan binatang. Berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks inilah sesungguhnya manusia menjadi lebih maju, lebih banyak memiliki kecakapan, pengetahuan dan keterampilan dibanding dengan binatang (Sukmadinata, 1997:45). Kondisi psikologis setiap individu berbeda, karena perbedaan terhadap perkembangannya, latar belakang sosial budayanya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya.

Berkait dengan pengembangan bahan pengajaran, terdapat tiga bentuk kegiatan instruksional, yaitu pengembangan bahan belajar mandiri, pengembangan bahan pengajaran konvensional dan pengembangan bahan pengajaran pada siswa (Atwi Suparman, 1994:2000). Pengembangan bahan pengajaran pada hakekatnya adalah mencari dan menentukan pokok materi formal, memperkaya dan menyempurnakan materi pengajaran dari bahan informal, juga menentukan pokok isi pelajaran dan mengorganisasikannya berdasar pendekatan dan ketentuan bidang studi serta tuntutan formal (Kosasih Djahiri, 1980:15) .

- **Pengintegrasian Sejarah Lokal dalam KTSP**

Di dalam pedoman penyusunan dan pengembangan KTSP, tergambar besarnya potensi pemanfaatan lingkungan dan budaya lokal sebagai salah satu sumber belajar maupun sarana penunjang (instrumen) bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Jika hal ini menyangkut masalah materi pelajaran sejarah, maka pemanfaatan sejarah lokal merupakan bagian dari hal tersebut. Potensi sejarah

terkait sejarah lokal di masing-masing daerah belum dapat dimaksimalkan dalam pembelajaran.

Secara umum bisa dikatakan, sejarah lokal belum mendapatkan tempat yang khusus dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Hal ini dikarenakan kurikulum sekolah orientasinya lebih ke arah nasional, sehingga agak sulit memasukkan materi sejarah lokal ke dalam pembelajaran sejarah. Memang dalam kurikulum sekolah telah tersirat adanya kurikulum Muatan Lokal, dimana sejarah lokal bisa mendapatkan porsi khusus disana. Namun pada kenyataannya di lapangan sekolah-sekolah yang kini mempunyai otonomi khusus untuk mengembangkan kurikulum tidak berani mencantumkan sejarah lokal sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Hal tersebut terjadi dikarenakan sumber-sumber tentang sejarah lokal yang tersedia di setiap daerah kurang atau bahkan tidak ada. Sebenarnya disinilah letak tantangan bagi guru sejarah untuk menggali sejarah lokal di daerahnya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan pada siswa SMA dimana pada masa ini siswa mulai mampu menganalisis sebuah problematika.

Suatu pengertian yang mendalam tentang perkembangan bangsa Indonesia sekarang, hanya bisa didapat melalui suatu pengetahuan yang luas dari kebudayaan semua suku bangsa di Indonesia, serta sejarah lokalnya (Koentjaraningrat, 1963: 32-33). Sementara itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan ditempuh dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan masa depan yang akan dihadapi siswa sebagai warga bangsa agar mereka mampu berpikir global dan bertindak sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal atau *think globally but act locally* (McLuhan dalam Masnur Muslich, 2007:11). Potensi lokal tersebut dapat diartikan sebagai potensi lokal dalam bidang sejarah, sehingga peristiwa sejarah serta peninggalan-peninggalan sejarah di daerah merupakan salah satu sumber pembelajaran sejarah yang sangat penting. Potensi lokal dalam bidang sejarah bahkan dapat berupa sejarah nasional di daerah namun belum banyak dieksploitasi dan eksplorasi dalam rangka kepentingan pendidikan khususnya pembelajaran sejarah.

- **Pengintegrasian Sejarah Lokal dalam Kurikulum 2013**

Dalam posisi ini materi sejarah lokal menjadi dasar bagi pengembangan

jati diri pribadi, budaya dan sosial peserta didik. Seperti dikatakan Cartwright (dalam Hamid Hasan,2007:5-6) bahwa "our personal identity is the most important thing we possess"(Identitas pribadi kita adalah hal terpenting yang kita miliki) maka materi sejarah lokal akan memberikan kontribusi utamanya dalam pendidikan sejarah. Selanjutnya seperti dikemukakan Cartwright lebih lanjut bahwa identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The way we feel about ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in the composition of our individual personality"("Memaknai siapa dan apa sesungguhnya diri kita. Cara kita memandang diri kita, cara kita mengekspresikan diri, dan bagaimana orang lain memandang diri kita adalah hal penting dari bagian kepribadian kita).

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam perspektif pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik memberikan gambaran kehidupan masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari.

Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah lokal tidak lagi sebagai sumber semata tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah. Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu peristiwa sejarah.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam mengembangkan materi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan sejarah, sebagaimana pendidikan lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila sumber tidak tersedia. Tulisan- tulisan mengenai berbagai peristiwa sejarah lokal belum banyak tersedia. Tentu saja ini tantangan bagi sejarawan untuk dapat menghasilkan tulisan sejarah lokal sebagai dasar untuk mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal.

- **Problema Sejarah Lokal dan Jawa Centris**

Salah satu kritik tajam pembelajaran sejarah Indonesia adanya eksplotasi materi yang “Jawa Sentris”. Kritikan ini disebabkan Sejarah Indonesia sangat identik dengan sejarah di Jawa menyangkut periodisasi jaman praaksara sampai sejarah Indonesia kontemporer, dari masa dahulu sampai saat ini. Kritik semacam ini banyak diungkapkan para pendidik sejarah, terutama para guru di luar Jawa yang sering mendapat pertanyaan kritis siswanya, mengapa yang diajarkan guru dan materi yang terdapat di buku pelajaran sejarah, didominasi oleh sejarah Jawa saja. Jika demikian, siswa di luar Jawa tentunya menjadi kehilangan sejarah di daerahnya masing-masing. Melihat fakta demikian, bagaimana jawaban dan solusinya?.

Sejarawan pada umumnya tertarik pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti istimewa. Untuk itu, Reiner (1997:99) membedakan apa yang disebut *occurrence* dengan *event*. *Occurrence* menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan *event* merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian “non historis” untuk peristiwa biasa, dan kejadian “historis” untuk peristiwa istimewa (Widja, 1988: 18). Terkadang batas antara peristiwa biasa dan peristiwa istimewa bersifat subyektif, tergantung dari sudut pandang masyarakat dan tentunya sejarawan. Hal ini disebabkan sering kali adanya keterkaitan antara peristiwa biasa dan istimewa, sebagai bagian dari rekonstruksi yang utuh tentang peristiwa masa lampau.

Terlepas adanya dikotomi tentang “peristiwa” tersebut, faktanya “Jawa” secara geografis dan etnis menjadi bagian penting dari sejarah di Nusantara. Secara kronologis, dimulai pada era prasejarah, penemuan situs manusia purba di Nusantara berada di Pulau Jawa, demikian juga sesudahnya. Meski berakhirnya prasejarah di Nusantara ditandai penemuan Prasasti Yupa dari

Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di wilayah Kalimantan, ataupun munculnya pengaruh Islam pertama di Nusantara berada di Sumatera, dengan adanya Perlak dan Samudera Pasai, namun dalam perkembangan sejarah di Nusantara yang menyangkut segala periodisasi sejarah di Indonesia, Jawa sebagai pusat dari fakta dan peristiwa sejarah itu sendiri.

Selanjutnya di masa kolonialisme-imperialisme, pergerakan nasional, masa kemerdekaan dan sesudahnya sampai sejarah kontemporer episentrum fakta dan peristiwa sejarah tidak bergeser dari Jawa. Jika membicarakan prasejarah di Indonesia, fakta tidak dapat dibantah bahwa situs-situs Sangiran, Trinil, Wajak, Pacitan dan lainnya memang berada di Jawa. Selanjutnya jika berbicara fakta sejarah Hindu-Budha, banyak peninggalan besar kerajaan seperti Borobudur, Prambanan, Mataram Kuno, Majapahit. Hal seperti ini akan berlanjut sebagaimana periodisasi dalam sejarah Indonesia, kronologis peristiwa terkait dalam wilayah yang sama yaitu Pulau Jawa.

Dari fakta di atas, pandangan bahwa sejarah Indonesia cenderung Jawa sentris sebagai hal yang tidak terbantahkan. Namun membagi sejarah dalam ranah pemerataan, agar sejarah daerah lain juga dipaksa diungkap, akan menyalahi makna dan hakekat ilmu sejarah itu sendiri. Namun sebenarnya ada solusi yang dapat digunakan dalam memahami permasalahan tersebut, yakni sejarah lokal. Jika Sejarah Nasional memuat berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat di wilayah Nusantara dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan kebangsaan maka Sejarah Lokal adalah suatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat di wilayah Nusantara dan memiliki pengaruh hanya di wilayah tersebut. Hal ini diperkuat dalam Permendikbud no 59 tahun 2014 lampiran III Umum, bahwa Mata pelajaran Sejarah Indonesia dikembangkan atas dasar : a. Semua wilayah/daerah memiliki kontribusi terhadap perjalanan Sejarah Indonesia hampir pada seluruh periode sejarah; b. Pemahaman tentang masa lampau sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk membangun semangat kebangsaan dan persatuan; c. Setiap periode Sejarah Indonesia memiliki peristiwa dan atau tokoh di tingkat nasional dan daerah serta keduanya memiliki kedudukan yang sama penting dalam perjalanan Sejarah Indonesia.

Dalam Permendikbud no 59 tahun 2014 lampiran III Peminatan dijelaskan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran Sejarah di SMA/MA adalah: *Pertama*. Pembelajaran Sejarah didasarkan atas

kesinambungan apa yang terjadi di masa lampau dengan kehidupan masa kini, antara peristiwa sejarah tingkat nasional dan tingkat lokal, dan pemahaman peristiwa sejarah di tingkat lokal berdasarkan keutuhan suatu peristiwa sejarah. *Kedua*. Dalam mengembangkan pemahaman mengenai kesinambungan antara apa yang terjadi di masa lampau dengan kehidupan masa kini, dalam tugas untuk setiap periode sejarah peserta didik diarahkan agar mampu menemukan peninggalan fisik (terutama artefak) dan peninggalan abstrak (tradisi, pikiran, pandangan hidup, nilai, kebiasaan) di masyarakat yang diwarisi dari peristiwa sejarah pada suatu periode. *Ketiga*. Dalam mengembangkan keterkaitan antara peristiwa sejarah di tingkat nasional dan tingkat lokal, dalam tugas setiap peserta didik diarahkan untuk mengkaji peristiwa sejarah di daerahnya, terutama peristiwa sejarah sejak masa pergerakan nasional, dan membuat analisis mengenai keterkaitan dan sumbangan peristiwa tersebut terhadap peristiwa yang terjadi di tingkat nasional.

Tampaknya dengan penjelasan demikian, dikotomi permasalahan pembelajaran sejarah sudah dapat diatasi. Namun permasalahan ini sebenarnya baru diselesaikan dalam kerangka besarnya saja. Berhasil tidaknya implementasi permasalahan ini, tergantung dari guru-guru sejarah di lapangan, untuk “berani” mengembangkan materi pembelajaran, dan tidak hanya bersandar buku-buku teks yang sudah ada. Jika buku-buku teks menjadi acuan total dalam pembelajaran sejarah, maka roh sejarah lokal akan mati suri. Hal ini disebabkan buku teks dirancang untuk pembelajaran sejarah dengan wilayah nasional.

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam perspektif pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik memberikan gambaran kehidupan

masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari.

Posisi materi sejarah lokal yaitu peristiwa sejarah lokal tidak lagi sebagai sumber semata tetapi juga menjadi objek studi sejarah peserta didik. Dalam kesempatan inilah mereka belajar mengembangkan wawasan, pemahaman, dan ketrampilan sejarah. Mereka dapat berhubungan langsung dengan sumber asli dan mengkaji sumber asli dalam suatu proses penelitian sejarah. Mereka dapat melatih diri dalam penafsiran sejarah dan kalau pun terjadi berbagai perbedaan di antar mereka maka itu akan memiliki nilai pendidikan yang sangat tinggi. Lagipula, para sejarawan tidak pernah memiliki suatu pandangan dan tafsiran yang sama terhadap suatu peristiwa sejarah.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam mengembangkan materi sejarah lokal dalam kurikulum pendidikan sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan sejarah, sebagaimana pendidikan lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik apabila sumber tidak tersedia. Tulisan- tulisan mengenai berbagai peristiwa sejarah lokal belum banyak tersedia. Tentu saja ini tantangan bagi sejarawan dan guru sejarah untuk dapat menghasilkan tulisan sejarah lokal sebagai dasar untuk mengembangkan materi pendidikan sejarah lokal.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi Perkembangan Sejarah Lokal dan Penerapannya dalam Pembelajaran, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
2. Aktivitas kelompok, meliputi :

- a. mendiskusikan materi pelatihan
- b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan
- c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/TUGAS/KASUS

Lembar Kerja 1.

a. Bacalah wacana berikut ini dengan baik!

Sejarah Lokal di Indonesia

Taufik Abdullah (1990:13-15) menguraikan tentang pengertian sejarah lokal dengan terlebih dulu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap istilah sejarah daerah. Sebuah istilah yang di Indonesia mendapat tempat yang sejajar dengan istilah sejarah lokal. Terkadang juga kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian tanpa penjelasan yang tegas. Sebagai bukti bahwa istilah sejarah daerah mendapat tempat adalah digunakannya istilah ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Proyek Penulisan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 1977/1978. Berkait dengan hal tersebut, sejarawan Taufik Abdullah mengajukan keberatannya. Menurutnya kata “sejarah daerah” harus ditinjau lebih sungguh-sungguh. Daerah dalam pengertian administratif merupakan kesatuan teritorial yang ditentukan jenjang hirarkinya. Daerah yang berada di bawah merupakan bagian dari daerah di atasnya. Sebagai contoh, kabupaten merupakan daerah di bawah yang menjadi bagian dari daerah di atasnya yang disebut dengan propinsi. Sedangkan kata “daerah” dalam pengertian politik biasanya dipertentangkan dengan kata “pusat” yang dianggap nasional. Keberatan terhadap penggunaan istilah sejarah daerah adalah karena daerah sebagai unit administratif kerap berbeda dengan daerah dalam pengertian etnis-kultural. Sebagai contoh, “Sejarah Minangkabau” tidak identik dengan “Sejarah Sumatera Barat”. Yang disebut pertama adalah konsep etnis-kultural, sedangkan yang kedua menunjuk pada pengertian administratif.

- b. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas, berdasar wacana di atas!
 - Apa perbedaan istilah sejarah lokal dan sejarah daerah?

- Apa sejarah lokal dapat memupuk semangat separatisme?

Lembar Kerja.2.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bagaimana kedudukan sejarah lokal dalam sejarah nasional?
2. Bagaimana pengintegrasian sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah?
3. Bagaimana hambatan pengembangan sejarah lokal dalam pembelajaran?
4. Mengapa materi pembelajaran sejarah di Indonesia, cenderung pada konsep Jawa sentris?
5. Bagaimana strategi mengurangi Jawa Centris dalam materi sejarah di sekolah?

F. RANGKUMAN

Taufik Abdullah (1990:13-15) menguraikan tentang pengertian sejarah lokal dengan terlebih dulu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap istilah sejarah daerah. Sebuah istilah yang di Indonesia mendapat tempat yang sejajar dengan istilah sejarah lokal. Terkadang juga kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian tanpa penjelasan yang tegas. Sebagai bukti bahwa istilah sejarah daerah mendapat tempat adalah digunakannya istilah ini oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Proyek Penulisan Sejarah Daerah Tahun Anggaran 1977/1978. Berkait dengan hal tersebut, sejarawan Taufik Abdullah mengajukan keberatannya. Menurutnya kata “sejarah daerah” harus ditinjau lebih sungguh-sungguh. Daerah dalam pengertian administratif merupakan kesatuan teritorial yang ditentukan jenjang hirarkinya. Daerah yang berada di bawah merupakan bagian dari daerah di atasnya. Sebagai contoh, kabupaten merupakan daerah di bawah yang menjadi bagian dari daerah di atasnya yang disebut dengan propinsi. Sedangkan kata “daerah” dalam pengertian politik biasanya dipertentangkan dengan kata “pusat” yang dianggap nasional. Keberatan terhadap penggunaan istilah sejarah daerah adalah karena daerah sebagai unit administratif kerap berbeda dengan daerah dalam pengertian etnis-kultural. Sebagai contoh, “Sejarah Minangkabau” tidak identik dengan “Sejarah Sumatera Barat”. Yang disebut pertama adalah konsep etnis-kultural, sedangkan yang kedua menunjuk pada pengertian administratif.

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan

tidak dalam perspektif ilmu sejarah tetapi dalam perspektif pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai menimbulkan konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan berkomunikasi. Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik memberikan gambaran kehidupan masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Sejarah Lokal?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi di atas?
3. Apa manfaat materi tersebut terhadap tugas Bapak/Ibu disekolah?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami sejarah ekonomi Indonesia dengan baik.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Memahami pengertian sejarah ekonomi
2. Menelaah karya-karya sejarah ekonomi Indonesia
3. Menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia dalam perspektif sejarah ekonomi

C. URAIAN MATERI

1. Pengantar

Sejarah ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai pencari dan pembelanja dalam perspektif historis (Kuntowijoyo, 1994:82). Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi di masa lalu dapat ditulis menjadi sejarah ekonomi. Beberapa bentuk kegiatan-kegiatan manusia dalam bidang ekonomi misalnya produksi, penjualan, pembelian, penawaran dan permintaan barang-barang, penggunaan sumber-sumber ekonomi, dan lain-lain. Singkatnya, sejarah ekonomi adalah sejarah yang membahas perilaku atau kegiatan ekonomi manusia di masa lampau

Lahirnya sejarah ekonomi bermula dari terbitnya karya *Wealth of Nations* (1770) oleh Adam Smith dan mulai berkembang pesat dengan kemunculan konsepsi sejarah material oleh Karl Marx pada abad ke-19. Sejarah ekonomi terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, bersifat tematik, yaitu yang lebih menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. *Kedua*, yang bersifat paradigmatis, yaitu faktor ekonomi dijadikan sebagai skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Ruang lingkup penulisan sejarah ekonomi bisa dalam skala yang lebih mikro maupun makro. Ruang lingkup yang lebih mikro, misalnya sejarah ekonomi pedesaan.

Dalam Sejarah Ekonomi dikenal ada dua mazhab, yaitu Annales (Perancis) dan Sejarah Ekonomi Baru. Kelompok pertama umumnya menaruh perhatian yang besar pada aspek ekonomi dari masa lampau. Aliran ini tidak hanya mengkaji sejarah ekonomi tetapi juga sejarah sosial. Dalam perkembangan selanjutnya tema sejarah semakin luas karena menggunakan berbagai metode, seperti: Sosiologi dan Antropologi. Sedangkan kelompok kedua, meneliti aspek-aspek ekonomi dengan bantuan teori ekonomi yang sudah berkembang pesat. Tahun 1957 dianggap sebagai lahirnya aliran Sejarah Ekonomi Baru ini. Sejarahwan ekonomi baru ini umumnya berangkat dari ahli ekonomi sebelum memasuki sejarah ekonomi. Aliran ini disebut *Cliometri* karena menggunakan teori-teori ekonomi, menggunakan data-data statistik, pengukuran matematis, komputer, dan berbagai teknik lainnya. Sejarahwan John Meyer menggunakan analisis output-output untuk mengukur perubahan-perubahan dalam volume perdagangan Inggris pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Inggris pada akhir abad ke-19.

Di Indonesia, kajian sejarah ekonomi kurang mendapatkan minat dari para sejarahwan (Thee Kian-wie, 1988:xvii). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh sejarahwan ekonomi Indonesia yang pada pertengahan tahun 1960-an menulis bahwa studi sejarah perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, masih berada pada tahap awal. Namun demikian, jumlah karangan-karangan sejarah ekonomi di Indonesia terbilang cukup banyak. Ekonomi pra-kolonial oleh Anthony Reid, Sistem Tanam Paksa oleh R.E. Elson, G.R. Knight, dan Robert Van Niel, Peranan Perkebunan Besar oleh Peter Boomgard, Colin Barlow, John Drabble, dan W.J. O'Malley, Sistem Perpajakan oleh Anne Booth, F.W. Diehl, Perdagangan Antarpulau dan Integrasi Ekonomi Indonesia oleh Howard Dick, dan masih ada lagi beberapa karangan lain (Thee Kian-wie, 1988:x). Berikut ringkasan mengenai sejarah ekonomi Indonesia.

2. Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Perekonomian Petani Jawa

Menjelang akhir abad XVIII VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda ini. Selain itu kas negeri Belanda juga sedang mengalami kekosongan akibat perang. Keuntungan VOC banyak tersedot untuk

menutup kesulitan keuangan ini. Maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC yang hampir berusia dua abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800 kekuasaan di Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda.

Bubarnya VOC bukan berarti penderitaan negara jajahan berakhir. Eksploitasi terhadap kekayaan nusantara terus berlangsung. Sistem eksploitasi yang dilakukan VOC dengan pemerintah kolonial memiliki persamaan yaitu adanya penyerahan wajib hasil-hasil pertanian meskipun cara yang agak berbeda. Pemerintah kolonial mengadakan hubungan dengan para petani secara langsung dan lebih intens untuk menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki.

Golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad XIX memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia\ Belanda sebagai daerah *wingewest* atau daerah yang menguntungkan negara induk. Sistem penyerahan\ paksa itu dapat diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian tanah jajahan yang langsung ditangani oleh pemerintah kolonial. Eksploitasi produksi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara.\Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam wajib atau tanam paksa (*cultuurstelsel*).

Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja. Sistem tanam paksa lebih mengutamakan peningkatan hasil produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa. Untuk itu pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman ekspor kepada petani di Jawa. Pelaksanaan tanam paksa dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masa itu. Sistem tanam paksa lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai bentuk eksploitasi (Robert van Niel dalam Anne Booth, dkk., 1988:101).

Meskipun dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa sistem tanam paksa membawa penderitaan, akan tetapi sistem tanam paksa membawa dampak besar bagi perubahan sosial ekonomi petani Jawa. Subsistensi yang sejak dulu menjadi warna dalam perekonomian petani Jawa mengalami pergeseran. Secara perlahan namun pasti sistem tanam paksa telah

memperkenalkan perekonomian uang yang kemudian semakin berkembang dengan masuknya modal asing dalam koridor ekonomi liberal.

Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman pertanian mereka bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Pungutan pajak dalam bentuk barang (*in natura*) akan membuat produksi tanaman perdagangan (*cash crops*) dapat dikumpulkan dalam jumlah besar. Produksi tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan itu, diharapkan akan dapat dikirimkan ke negeri induk, yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor di pasaran dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik bagi pemerintah maupun para pengusaha di negeri Belanda, sehingga utang negeri induk segera dapat dibayar (Kartodirdjo dan Suryo, 1991:54).

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, van den Bosch menghendaki peningkatan campur tangan orang Eropa dalam proses produksi. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Penyerahan hasil tanaman, menurut teorinya, dilakukan atas kemauan penduduk sendiri namun tentu dalam kenyataannya tidaklah demikian. Tuntutan kerja paksa (*kerja rodi*) atau pekerjaan tanam paksa diwajibkan bagi penanaman kopi yang hampir semuanya dilakukan di tanah yang belum digarap, meskipun pada praktiknya penanaman juga dilakukan di lahan pertanian yang sudah digarap.

Dalam teorinya sebagai upah atas penanaman tanaman yang diminta pemerintah maka penduduk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah. Pajak nantinya dipungut bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk *in natura* atau dengan memberikan tenaganya untuk bekerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan dicegah agar tidak menjalankannya sebagai rumah tangga uang (Kartodirdjo dan Suryo, 1991:55).

Tujuan pelaksanaan sistem tanam paksa mengikuti pola kekuasaan tradisional masyarakat Jawa. Kaum tani digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman ekspor. Untuk itu diharapkan para kepala desa dan birokrasinya mampu menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakkan orang-orang bekerja

dengan cara baru. Masyarakat desa dipaksa menyerahkan pemakaian sebagian tanah mereka untuk penanaman tanaman keperluan pemerintah dan sebagian besar masih untuk menanam padi keperluan masyarakat. Tujuannya ialah agar masyarakat Jawa tetap statis secara ekonomi agraris (Robert van Niel dalam Booth, dkk., 1988:116).

Kenyataannya hal ini tidaklah demikian. Sasaran pokok dari sistem tanam paksa yaitu memperoleh produksi setinggi-tingginya. Sasaran ini justru menimbulkan banyak terjadi penyimpangan di lapangan yang menimbulkan tekanan berat terhadap rakyat pedesaan. Penyimpangan ini didasari pada “kejar setoran” yang dilakukan oleh para birokrat local (Kurniawan, 2014:166). Sistem tanam paksa berjalan dengan berbagai kesukaran dan perlakuan yang menyakitkan terhadap kaum petani Jawa. Akan tetapi pada sisi lain pandangan sejarah makin lama makin mencoba memperlihatkan kerangka perubahan sosial-ekonomi masyarakat Jawa yang lebih luas (Robert van Niel dalam Anne Booth, dkk., 1988:104-105).

Aturan mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa pada dasarnya masih dapat diterima karena masih berada dalam koridorkoridor kewajaran yang masuk akal. Permasalahannya ialah dalam praktiknya sistem tanam paksa menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Menurut Kartodirdjo dan Suryo (1991:56) dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, nomor 22, sistem tanam paksa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang

harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.

6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk.
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.

Kartodirdjo dan Suryo (1991:63) menjelaskan mengenai penyimpangan tanam paksa khususnya pada pembagian tanah. Bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman wajib melebihi dari $\frac{1}{5}$ bagian seperti yang ditentukan, misalnya sampai $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ bagian, bahkan sering seluruh tanah desa. Demikian juga pembayaran setoran hasil tanaman banyak yang tidak ditepati menurut jumlah yang diserahkan, atau banyak kerja yang semestinya mendapat upah, tetapi tidak dibayarkan upahnya. Kegagalan panen dibebankan kepada penduduk. Pengerahan tenaga kerja perkebunan ke tempat-tempat yang jauh dari desa tempat tinggal penduduk, kerja rodi di pabrik-pabrik dan tempat lain tanpa upah yang tentu memberatkan penduduk.

Secara umum pelaksanaan sistem tanam paksa telah mempengaruhi dua unsur pokok kehidupan agraris pedesaan Jawa, yaitu tanah dan tenaga kerja. Akan tetapi menurut Robert van Niel dalam Anne Booth (1988 : 130), dampak dari sistem tanam paksa di Jawa selain mempengaruhi tanah (kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi pedesaan) dan munculnya tenaga buruh yang murah, masih ditambah satu hal lagi yaitu lahirnya pembentukan modal di desa. Perolehan laba yang sangat luar biasa bagi Belanda menunjukkan bahwa sistem tanam paksa merupakan eksploitasi Belanda, terutama di Jawa pada periode 1830-1870.

Petani Jawa sejak awal terbentur oleh moral ekonominya yang subsisten. James C. Scoot (1981:26) menjelaskan bahwa petani menganut prinsip "utamakan selamat". Para petani lebih senang meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu bencana (gagal panen) daripada meningkatkan penghasilannya. Dalam memilih bibit dan cara-cara bertanam para petani lebih menghindari risiko daripada melakukan spekulasi untuk meningkatkan penghasilannya.

Untuk itulah petani lebih senang menanam tanaman pangan daripada tanaman perdagangan apalagi tanaman ekspor. Sistem tanam paksa telah mengubah pola yang sejak dulu diyakini oleh para petani. Mereka dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan ekonomi Belanda. Hal ini otomatis mengurangi produksi tanaman pangan mereka. Peralihan dari produksi subsistensi ke produksi komersil hampir selalu memperbesar risiko.

Selain itu produksi komersil dalam sistem tanam paksa tidak menjamin persediaan pangan bagi keluarga. Akibat dari sistem tanam paksa maka memaksa petani untuk mengubah pola pikirnya. Perubahan dalam sistem kerja juga telah mengenalkan sistem ekonomi uang (*monetisasi*) ke dalam lingkungan kehidupan pedesaan agraris (Kartodirdjo dan Suryo, 1991:68). Kehidupan perekonomian yang semula masih tradisional dan subsisten secara berangsur-angsur berkenalan dengan ekonomi uang melalui komersialisasi produksi pertanian dan pasaran kerja. Sistem tanam paksa telah menjadi pintu masuk peredaran uang ke daerah pedesaan. Sistem ekonomi uang ini membuat para petani mulai tergantung pada dunia luar.

Produksi pertanian dirasakan sebagai komoditi untuk ekspor dan pasar dunia. Sistem ini mulai menggoyang sistem ekonomi subsisten sebagai ekonomi tradisional yang bersifat tertutup dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri bagi petani. Kartodirdjo dalam Robert van Niel (2003:ix) mengungkapkan bahwa teori dualisme ekonomi yang diajukan Boeke (1942, 1953) yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi modern yang dipraktikkan negaram kolonial hidup berdampingan dengan sistem ekonomi tradisional (ekonomi subsistensi) dan tidak saling mengganggu, tidaklah benar. Hal ini terbukti dengan munculnya resistensi petani, seperti Pemberontakan Petani Banten 1888, dan berbagai gerakan protes petani lainnya di Jawa abad XIX.

3. Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial

Periode sejarah Indonesia 1870-1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun daerah-daerah luar Jawa. Selama masa ini modal swasta dari Belanda

dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang besar di Deli, Sumatera Timur (Daliman, 2001:47)

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan dengandikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Di satu pihak Undang UndangAgraria itu bertujuan melindungi petani-petani Indonesia terhadap kehilangan hak milikat tanah mereka terhadap orang-orang asing, dan di pihak lain Undang-Undangtersebut membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari rakyatIndonesia bagi kepentingan perkebunan.

Demikianlah sejak tahun 1870 industri-industriperkebunan Eropa mulai masuk ke Indonesia.Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tanganpemerintah serta penghapusan unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorongperkembangan ekonomi Hindia-Belanda. Undang-undang Agraria tahun 1870 membukaJawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Hanyaorang-orang Indonesialah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asingdiperkenankan menyewanya dari pemerintah sampai selama tujuh puluh lima tahun ataudari para pemilik pribumi untuk masa paling lama antara lima dan dua puluh tahun.

Perkebunan swasta kini dapat berkembang di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa.Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan pelayaran dengankapal uap dari waktu itu mendorong lebih lanjut perkembangan swasta dengan semakinmembaiknya sistem perhubungan dengan Eropa. Perbaikan sistem perkapalan juga dapatmemperlancar transportasi. Mulai tahun 1877 dibangun adanya pelabuhan, jalur keretaapi, pengembangan lalu lintas, dan telekomunikasi. Namun demikian, semua itu bagi rakyat Indonesia hanya menjadi titik awal eksploitasi ekonomi baru oleh kaum kapitalis (modal swasta) (Ricklef,

Zaman liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi yang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanah mereka kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar. Berkembangnya perkebunan-perkebunan tersebut memberikan peluang kepada rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan.

Selain itu juga penetrasi di bidang ekspor import tekstil yang mematkan kegiatan kerajinan tenun di Jawa. Perkembangan pesat perkebunan-perkebunan

teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870-1885. Selama masa ini mereka mampu meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang-barang ini di pasar dunia.

Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret, karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891 harga pasaran tembakau dunia juga turun drastis. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia dikarenakan penanaman gula bityang mulai ditanam di Eropa, sehingga mereka tidak perlu mengimpor lagi gula dari Indonesia. Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia-Belanda. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan tetapi direorganisasi sebagai perseroan terbatas. Bank perkebunan jugam tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan, namun setelah adanya krisis 1885 mereka pun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan-perkebunan besar itu.

Pada akhir abad ke- 19, terjadi perkembangan baru dalam kehidupan ekonomi di Hindia- Belanda. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Kehidupan ekonomi Hindia-Belanda, khususnya Jawa mulai dikendalikan oleh kepentingan finansial dan industri di negeri Belanda, dan tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin perkebunan besar yang berkedudukan di Jawa (Ricklef, 1991:55-56).

Berbeda dengan industri-industri perkebunan besar di Jawa yang berkembang dengan pesat pada masa liberalisme dan sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan pemerintah kolonial, maka sebaliknya pada masa yang sama tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama Jawa semakin mundur. Jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah yang terbaik kualitasnya sudah digunakan, sehingga tanaman-tanaman padi hanya ditanam pada lahan yang tandus saja.

Pembebasan petani secara berangsur-angsur dari penanaman komoditi ekspor yang sifatnya paksaan hanya menimbulkan sedikit perbaikan, karena pajak tanah dan bentuk-bentuk pembayaran lainnya masih tetap harus diserahkan kepada pemerintah, tetapi sumber penghasilan untuk membayar pajak tersebut telah dihapuskan. Penderitaan itu sangat dirasakan terutama di daerah penanaman kopi, karena lahan yang digunakan untuk menanam kopi

tidak dapat digunakan lagi untuk penanaman yang lainnya (Ricklef, 1991: 190-191)

Krisis perdagangan tahun 1885 juga mempersempit penghasilan penduduk Jawa, baik berupa upah yang berlaku bagi pekerjaan perkebunan maupun yang berupa sewa tanah. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat Jawa dapat dilihat pula dari menurunnya angka-angka impor barang-barang konsumsi, seperti tekstil, pada akhir abad ke-19. Di bawah ini beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia khususnya Jawa yaitu :

- a. Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar.
- b. Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis.
- c. Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem *verschoot* (uang muka).
- d. Sistem tanam paksa dihapus, namun diberlakukan sistem *batik saldo*.
- e. Krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciptaan dalam kegiatan pengusahapengusahaperkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja dan sewa tanah

4. Krisis Ekonomi 1930-an

Telah di sebutkan bahwa tahun 1930 merupakan puncak terjadinya krisis ekonomi yang bersekala internasional. Tentu saja, bagi wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sangat terpuak dengan adanya krisis tersebut, karena banyak produksi yang berorientasi ekspor sangat rentan terhadap siklus perdagangan. Diketahui bahwa Indonesia adalah wilayah yang bersifat agraris dan pada waktu itu termasuk wilayah yang perekonomiannya utamanya didasarkan pada pengekspor bahan-bahan mentah, di samping itu juga merupakan negara debitur (pengutang), sehingga ketika terjadi krisis ekonomi, maka relatif lebih sensitif terhadap kemerosotan ekonomi dibanding negara-negara lain yang berada dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, di Indonesia pada saat itu harga-harga produk ekspor jatuh secara drastis, melebihi dari harga barang-barang yang diimpor. Akibatnya, perbandingan harga-harga barang impor dan ekspor tidaklah seimbang.¹⁶

Sementara itu, untuk mengatasi goncangan depresi ekonomi ini, timbullah berbagai strategi untuk keluar dari kesulitan ekonomi, baik dari pihak pemerintah maupun dari berbagai perusahaan. Salah satu strategi itu, misalnya, apa yang terkenal dengan *bezuiniging* (penghematan) anggaran pemerintah atau disebut juga dengan efisiensi. Tentu saja, kebijakan semacam ini merupakan kebijakan yang berat sebelah, sehingga semakin menambah kesengsaraan, terutama bagi masyarakat kecil. Hal semacam itu terjadi, karena setelah pemerintah mengambil kebijakan *bezuiniging*, berdampak pada adanya pengurangan anggaran belanja (*begrooting*), sehingga banyak para pegawai pemerintah yang mengalami penurunan gaji atau bahkan diberhentikan. Demikian pula di pihak perusahaan perkebuan, mereka memberlakukan pemotongan gaji para buruh atau memberhentikannya dengan alasan efisiensi. Sebagaimana dilaporkan bahwa pemberlakuan pemotongan anggaran yang lebih ketat dilakukan oleh Menteri Urusan Tanah Jajahan, De Graff, dan terutama oleh penggantinya Colijn. Sementara itu, akibat dari pemotongan anggaran ini lebih lanjut akan menjadi bencana politik, ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, Ricklefs menyebutkan bahwa dampak krisis tahun 1930-an ini terhadap bangsa Indonesia jelas sangat serius. Para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidup, namun banyak juga di antara mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sebagian lahan yang tidak lagi digunakan untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi, tetapi sayangnya peningkatan produksi padi tidak sepenuhnya dapat menyediakan keperluan makanan dan pekerjaan bagi populasi yang terus menerus bertambah. Kenyataannya, ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934.

Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa setidaknya hingga akhir tahun 1930-an, kesejahteraan rakyat Indonesia menurun. Baru tahun 1937, dapat dikatakan pendapatan per kapita mungkin telah meningkat seperti tahun 1929.¹⁸ Namun, perlu ditekankan bahwa pada dasarnya baik tahun 1930-an ataupun tahun-tahun sebelumnya sebenarnya rakyat Indonesia tidak dapat berharap banyak kepada pemerintah Belanda, karena kesengsaraan selalu diterima rakyat pada umumnya. Apalagi tahun 1930-an, tidak ada alasan untuk optimis bagi rakyat Indonesia baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Misalnya dalam bidang

politik, pemerintahan Belanda menentang semua bentuk nasionalisme dan juga tidak ingin melihat Volksraad memainkan peranan penting.

Rapat-rapat politik orang Indonesia sering kali dibubarkan oleh pihak polisi dan para pembicaranya ditangkap. Dalam lingkungan seperti ini, tidak mengherankan apabila nasionalisme hanya mendapat sedikit kemajuan.¹⁹ Itulah gambaran umum kondisi ekonomi, sosial maupun politik yang terjadi pada tahun 1930-an. Kemudian, di mana posisi golongan menengah dan bagaimana gerakan-gerakan mereka yang tengah tumbuh dan berlangsung itu. Di sini perlu ditegaskan bahwa dengan terjadinya depresi ekonomi ini mereka sadar bahwa rasa persatuan atau nasionalisme yang tengah tumbuh ini perlu ditingkatkan. Mereka berfikir bagaimana kesulitan ekonomi masyarakat ini dapat teratasi. Oleh karena itu, tercetuslah di kalangan mereka untuk mengadakan gerakan-gerakan terutama di bidang ekonomi, sehingga pada saat itu tampak muncul kekuatan ekonomi baru.

Tampaknya, gerakan mereka dalam bidang ekonomi pada kenyataannya memang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, yaitu struktur yang cenderung lebih tahan dari hantaman depresi ekonomi. Ekonomi koperasi inilah yang salah satunya digalakan oleh kaum pergerakan untuk pengentasan kesulitan ekonomi akibat depresi ekonomi. Akibat adanya depresi ekonomi ini memang muncul di berbagai daerah jenis usaha koperasi, terutama yang diprakarsai oleh kaum pergerakan.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting. Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup:

3. Aktivitas individu, meliputi:
 - d. Memahami dan mencermati materi diklat

- e. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyesuaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
 - f. Melakukan refleksi
4. Aktivitas kelompok, meliputi:
- d. Mendiskusikan materi pelatihan
 - e. Bertukar pengalaman dalam melakukan pembelajaran materi terkait
 - f. Penyelesaian masalah/kasus

E. LATIHAN/TUGAS/KASUS

Lembar Kerja 1

Tugas Individu

3. Jelaskan pengertian sejarah ekonomi!
4. Jelaskan perbedaan antara Mahdzab Annales dan Sejarah Ekonomi Baru dalam penulisan sejarah ekonomi!

Lembar Kerja 2

Tugas Kelompok

1. Pada tahun 1960-an studi sejarah ekonomi Indonesia bisa dikatakan masih berada pada tahap awal. Buatlah analisis mengenai penyebab terjadinya hal tersebut!
2. Inventarisir dan telaah karya-karya sejarah ekonomi Indonesia!

F. RANGKUMAN

1. Sejarah ekonomi adalah sejarah yang membahas perilaku atau kegiatan ekonomi manusia di masa lampau.
2. Dalam Sejarah Ekonomi dikenal ada dua mahdzab, yaitu Annales (Perancis) dan Sejarah Ekonomi Baru. Kelompok pertama umumnya menaruh perhatian yang besar pada aspek ekonomi dari masa lampau. Aliran ini tidak hanya mengkaji sejarah ekonomi tetapi juga sejarah sosial. Dalam perkembangan selanjutnya tema sejarah semakin luas karena menggunakan berbagai metode, seperti: Sosiologi dan Antropologi. Sedangkan kelompok kedua, meneliti aspek-aspek ekonomi dengan bantuan teori ekonomi yang sudah berkembang pesat.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari materi sejarah ekonomi Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang bapak/ibu peroleh setelah mempelajari materi sejarah ekonomi Indonesia?
3. Manfaat penting apa yang bapak/ibu peroleh yang dapat diterapkan ke dalam pembelajaran di kelas di sekolah masing-masing setelah mempelajari materi sejarah ekonomi Indonesia?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

ANALISIS RPP

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat diharapkan mampu menganalisis RPP sesuai prinsip dan sistematika yang berlaku.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Mendiskripsikan rambu rambu penyusunan RPP
2. Menganalisis RPP
3. Melaporkan hasil analisis RPP dengan format yang tersedia
4. Memberi masukan untuk perbaikan RPP yang telah dianalisis

C. URAIAN MATERI

1. Konsep Analisis RPP

Tahap pertama dalam pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Untuk menyusun RPP yang benar Anda dapat mempelajari hakikat, prinsip dan langkah-langkah penyusunan RPP seperti yang tertera pada Permendiknas tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah - Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran nomor 103 Tahun 2014

2. Pedoman Analisis RPP

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal

semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan.

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat.

a. Kajian Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Menengah

- (1) Prinsip-prinsip RPP yang harus diikuti pada saat penyusunan RPP adalah:
 - a) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
 - b) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
 - c) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
 - d) Berpusat pada peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
 - e) Berbasis konteks
Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
 - f) Berorientasi kekinian
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.

- g) Mengembangkan kemandirian belajar
Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- h) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- i) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- j) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

(2) Komponen dan Sistematika RPP

Di dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2015, komponen-komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah :

Mata pelajaran :

Kelas/Semester :

Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)

B. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)

1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4

D. Materi Pembelajaran

(dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama: (...JP)
 - a. Kegiatan Pendahuluan
 - b. Kegiatan Inti **)
 - Mengamati
 - Menanya
 - Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar/mengasosiasi
 - Mengomunikasikan
 - c. Kegiatan Penutup
2. Pertemuan Kedua: (...JP)
 - a. Kegiatan Pendahuluan
 - b. Kegiatan Inti **)
 - Mengamati
 - Menanya

- Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar/Mengasosiasi
 - Mengomunikasikan
- c. Kegiatan Penutup

3. Pertemuan seterusnya.

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian
 - a. Pertemuan Pertama
 - b. Pertemuan Kedua
 - c. Pertemuan seterusnya
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

Contoh RPP Sejarah Indonesia

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA NEGERI 1 JOMBANG

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia

Kelas / semester : XII / 1

Alokasi waktu : 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatikandiri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisispengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifikdi bawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar

- 1.2. Mengamalkan hikmah kemerdekaan sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME, dalam kegiatan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2.1 Meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari

- 2.2. Berlaku jujur dan bertanggungjawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran sejarah
- 3.3. Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.
- 4.3. Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

C. Indikator

- 1.2.1 . Membiasakan sikap bersyukur terhadap berbagai dinamika permasalahan yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal untuk dijadikan refleksi di masa sekarang
- 2.1.1 Meneladani sikap dan tindakan cinta damai dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh tokoh sejarah dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungannya
- 2.1.2 Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah
- 3.3.1 Menjelaskan situasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di menjelang Demokrasi Liberal
- 3.3.2 Menganalisis situasi ekonomi di masa Demokrasi Liberal
- 3.3.3 Menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masa Demokrasi Liberal
- 3.3.4 Menganalisis permasalahan politik di masa Demokrasi Liberal
- 3.3.5 Menganalisis permasalahan keamanan nasional di masa Demokrasi Liberal
- 3.3.6 Mengevaluasi permasalahan ekonomi, politik, sosial dan kemanan nasional di masa Demokrasi Liberal
- 4.3.1 Membuat laporan sederhana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
- 4.3.2 Mempresentasikan hasil laporan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

D. Materi Pembelajaran

Demokrasi Liberal di Indonesia

E. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Kegiatan Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengucapkan salam • Berdoa sebelum membuka pelajaran • Memeriksa kebersihan kelas • Memeriksa kehadiran siswa • Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya • Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu • Menegur siswa yang terlambat dengan sopan • Menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran; • Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; • Menjelaskan indikator pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; • Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 	10 menit

Kegiatan Inti (model PBL)

FASE – FASE	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
Fase 1 Orientasi peserta didik	Pemberian stimulus, menayangkan gambar dan cuplikan film tentang situasi dan kondisi di masa Demokrasi Liberal. Menjelaskan garis besar materi tentang permasalahan politik dan	75 menit

<p>kepada masalah (mengamati)</p>	<p>ekonomi di masa Demokrasi Liberal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lamban di Masa Demokrasi Liberal. Bagaimana strategi pemerintah RI dalam menghadapi permasalahan ekonomi di Masa Demokrasi Liberal? 2. Pada masa Demokrasi Liberal, situasi politik memanas. Bagaimana strategi pemerintah RI dalam menghadapi permasalahan politik tersebut? 		
<p>Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik (menanya)</p>	<p>Membentuk kelompok-kelompok peserta didik, dimana masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda.</p> <p>Membagi peserta didik dalam 4 kelompok. Kelompok 1 dan 2 membahas dan memecahkan permasalahan pertanyaan ke- 1. Kelompok 3 dan 4, membahas dan memecahkan permasalahan pertanyaan ke 2.</p>		
<p>Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok (mengumpulkan informasi)</p>	<p>Membantu peserta didik untuk mengumpulkan data/ informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber (mentah maupun aktual) dan melaksanakan eksperimen sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri.</p>		
<p>Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p>	<p>Peserta didik menciptakan arteifak (hasil karya) yang tidak sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan</p>		

(menalar)	pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia	
Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (mengkomunikasikan)	Peserta didik merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan.	

Kegiatan Penutup

Kegiatan	Diskripsi	Alokasi waktu
Kegiatan penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dengan dibantu guru mencoba membuat rangkuman dari hasil diskusinya • Peserta didik diberikan pertanyaan lisan secara acak untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran minggu ini untuk minggu selanjutnya dengan mengacu pada pertanyaan uji kompetensi pokok bahasan selanjutnya. 	10 menit

F. Penilaian Proses dan hasil belajar

- Teknik : Tes dan Non Tes
- Bentuk : Essay untuk kerja dan portofolio
- Instrumen : Tes dan Non tes
- Kunci dan Pedoman penskoran

G. Media, Alat dan sumber pembelajaran :

1. Media :
 - a. Power point
 - b. Kartu masalah
 - c. Papan tulis
 - d. LCD
2. Alat / Bahan
 - a. Laptop
 - b. Hand out materi Demokrasi Liberal di Indonesia
3. Sumber belajar :
 - a. 2013 Sejarah Indonesia, Jakarta, Kemendikbud (Buku Guru Kelas XII)
 - b. 2013, Sejarah Indonesia, Jakarta Kemendikbud (Buku Siswa Kelas XII)
 - c. I Wayan Badrika 2004, Sejarah SMA, Jakarta Penerbit Airlangga.

Jombang, 19 Mei 2015

Mengetahui

Kepala Sekolah SMKN 1 Jombang

Guru Mata Pelajaran

Drs. SUPRIYADI, M.Kes

NIP. 196206101987101004

Drs. MISBAKHUL MUNIR

NIP. 196501212000031003

b. Analisis RPP

Telaah rencana pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan agar peserta diklat mampu menyusun, menelaah kemudian menganalisis RPP yang menerapkan pendekatan saintifik sesuai model belajar yang relevan dan mampu untuk melakukan perbaikan.

Langkah Kegiatan:

1. Pelajari prinsip-prinsip penyusunan RPP!

2. Siapkan dokumen kurikulum Permedikbud nomor 103 dan nomor 104 tahun 2014, hasil kegiatan Penjabaran KD kedalam Indikator Pencapaian Kompetensi dan Materi Pembelajaran
3. Susunlah RPP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya, komponen-sistematika RPP*) dan **format RPP**)** yang tersedia!
4. Setelah selesai, telaah kembali RPP yang disusun menggunakan format telaah RPP untuk kesempurnaan RPP yang kelompok Anda susun!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda!
6. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain!

Catatan:

- *) Komponen-sistematika RPP yang ada di dalam modul sesuai dengan Permedikbud nomor 103 tahun 2014.
- ***) Format RPP dikembangkan sesuai sistematika RPP pada Permendikbud, lay out tidak harus sama tetapi diharapkan disusun dengan rapih, sistematis dengan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami.

Alternatif Format RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	
Sekolah:	_____
Mata pelajaran:	_____
Kelas/Semester:	_____
Alokasi Waktu:	_____
<p>A. Kompetensi Inti (KI)</p> <p>B. Kompetensi Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KD pada KI-1 2. KD pada KI-2 3. KD pada KI-3 4. KD pada KI-4 <p>C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator KD pada KI-1 	

2. Indikator KD pada KI-2

3. Indikator KD pada KI-3

4. Indikator KD pada KI-4

D. Materi Pembelajaran

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama: (...JP)

Langkah Pembelajaran	Sintak Model Pembelajaran	Deskripsi	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan		Memuat kegiatan	
Kegiatan Inti (**)		- Mengamati - Menanya - Mengumpulkan informasi/mencoba - Menalar/mengasosiasi - Mengomunikasikan	
Kegiatan Penutup			

2. Pertemuan Pertama: (...JP)

Langkah Pembelajaran	Sintak Model Pembelajaran	Deskripsi	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan		Memuat kegiatan	
Kegiatan Inti (**)		- Mengamati - Menanya - Mengumpulkan informasi/mencoba - Menalar/mengasosiasi - Mengomunikasikan	
Kegiatan Penutup			

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik penilaian
2. Instrumen penilaian
 - a. Pertemuan Pertama
 - b. Pertemuan Kedua
 - c. Pertemuan seterusnya
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
4. Kunci dan Pedoman Penskoran

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/Alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Materi ini berisi tentang pembelajaran sistematika RPP, rambu rambu penyusunan RPP, analisis RPP, laporan hasil analisis RPP, dan perbaikan RPP.

Untuk memahami materi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
 - c. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. mendiskusikan materi pelatihan
 - b. bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan
 - c. penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

Tugas Individu

1. Baca secara cermat modul ini sebelum anda mengerjakan tugas
2. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam modul ini
3. Konsultasikan dengan Narasumber bila mengalami kesulitan mengerjakan tugas
4. Berdasarkan sistematika dan prinsip penyusunan RPP yang sesuai dengan Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah, Periksalah RPP Bapak/Ibu dengan seksama, revisilah terlebih dahulu sebelum di telaah oleh peserta yang lain
5. Buatlah penilaian terhadap RPP peserta lain dengan menggunakan rubrik telaah RPP yang sudah ada.
6. Rubrik Penilaian RPP ini digunakan peserta pada saat menelaah RPP peserta lain dan digunakan fasilitator untuk menilai RPP yang disusun oleh masing-masing peserta. Selanjutnya nilai RPP dimasukkan ke dalam nilai portofolio peserta.

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut:

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut:

1. Cermati format RPP dan telaah RPP yang akan dinilai!
2. Periksalah RPP dengan seksama
3. Berikan nilai setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kolom pilihan skor (1), (2) dan (3) sesuai dengan penilaian Anda terhadap RPP tersebut!
4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan setiap komponen RPP jika diperlukan!
5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen!

6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{90} \times 100\%$$

PERINGKAT	NILAI
Amat Baik (A)	$90 \leq A \leq 100$
Baik (B)	$75 \leq B < 90$
Cukup (C)	$60 \leq C < 74$
Kurang (K)	< 60

FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Materi Pelajaran: _____

Topik/Tema: _____

Berilah tanda cek (V) pada kolom skor (1, 2, 3) sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom tersebut! Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda!

No	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
A.	Identitas Mata Pelajaran	Tidak Ada	Kurang Lengkap	Sudah Lengkap	
1.	Satuan pendidikan, Mata pelajaran/tema, kelas/ semester dan Alokasi waktu.				
B.	Pemilihan Kompetensi	Tidak Ada	Kurang Lengkap	Sudah Lengkap	
1.	Kompetensi Inti				
2.	Kompetensi Dasar				
C.	Perumusan Indikator	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan KD.				
2.	Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur.				
3.	Kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.				
D.	Pemilihan Materi Pembelajaran	Tidak	Sesuai	Sesuai	

No	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
		Sesuai	Sebagian	Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan KD				
2.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
3.	Kesesuaian dengan alokasi waktu.				
E.	Pemilihan Sumber Belajar	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan KI dan KD.				
2.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik.				
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
F.	Kegiatan Pembelajaran	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas.				
2.	Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik.				
3.	Kesesuaian dengan sintak model pembelajaran yang dipilih				
4.	Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi.				
5.	Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi.				
G.	Penilaian	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan teknik penilaian autentik.				
2.	Kesesuaian dengan instrumen penilaian autentik				
3.	Kesesuaian soal dengan dengan indikator pencapaian kompetensi.				
4.	Kesesuaian kunci jawaban dengan soal.				
5.	Kesesuaian pedoman penskoran dengan				

No	Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Hasil Penelaahan dan Skor			Catatan
		1	2	3	
	soal.				
H.	Pemilihan Media Belajar	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran				
2.	Kesesuaian dengan kegiatan pada pendekatan saintifik.				
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
I.	Pemilihan Bahan Pembelajaran	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran				
2.	Kesesuaian dengan kegiatan pada pendekatan saintifik.				
J.	Pemilihan Sumber Pembelajaran	Tidak Sesuai	Sesuai Sebagian	Sesuai Seluruhnya	
1.	Kesesuaian dengan materi pembelajaran				
2.	Kesesuaian dengan kegiatan pada pendekatan saintifik.				
3.	Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.				
Jumlah					

Komentar/Rekomendasi terhadap RPP secara umum.

.....

Nama Penelaah :

Yang ditelaah :

F. RANGKUMAN

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan.

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat.

Analisis RPP ini bertujuan agar peserta diklat mampu menyusun, menelaah kemudian menganalisis RPP dengan menerapkan pendekatan saintifik sesuai model belajar yang relevan dan mampu untuk melakukan perbaikan.

G. UMPAN BALIK

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi analisis rencana pelaksanaan pembelajaran?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran?
3. Apa manfaat materi analisis rencana pelaksanaan pembelajaran terhadap tugas Saudara di sekolah?

4. Setelah Saudara mempelajari modul diatas, apakah yang akan saudara lakukan terhadap dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?
5. Apakah Saudara bersedia menjadi tutor bagi teman sejawat untuk menelaah dan memperbaiki RPP ?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

ANALISIS BUTIR SOAL MENGGUNAKAN PROGRAM BERBANTUAN KOMPUTER

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta diklat mampu mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sehingga diketahui informasi diagnostik pada peserta didik terkait dengan pemahaman materi yang telah diajarkan.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan pentingnya analisis butir soal
2. Mengenal berbagai macam program berbantuan komputer untuk analisis butir soal
3. Menyusun analisis soal ujian dengan menggunakan program berbantuan komputer iteman

C. URAIAN MATERI

1. Pengertian

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan penelaahan adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Di samping itu, tujuan analisis butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum memahami materi yang telah diajarkan.

Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuannya di antaranya dapat menentukan peserta didik mana yang sudah atau belum menguasai materi yang diajarkan guru.

2. Manfaat Soal yang Telah Ditelaah

Tujuan utama analisis butir soal dalam sebuah tes yang dibuat guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah: (1) dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan, (2) sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas, (3) mendukung penulisan butir soal yang efektif, (4) secara materi dapat memperbaiki tes di kelas, (5) meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Di samping itu, manfaat lainnya adalah: (1) menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan, (2) memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas, (3) memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa, (4) memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum, (5) merevisi materi yang dinilai atau diukur, (6) meningkatkan keterampilan penulisan soal.

Analisis butir soal biasanya didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

(1) Apakah fungsi soal sudah tepat? (2) Apakah soal ini memiliki tingkat kesukaran yang tepat? (3) Apakah soal bebas dari hal-hal yang tidak relevan? (4) Apakah pilihan jawabannya efektif? Kegunaan analisis butir soal bukan hanya terbatas untuk meningkatkan butir soal, tetapi ada beberapa hal, yaitu bahwa data analisis butir soal bermanfaat sebagai dasar: (1) diskusi kelas efisien tentang hasil tes, (2) untuk kerja remedial, (3) untuk peningkatan secara umum pembelajaran di kelas, dan (3) untuk peningkatan keterampilan pada konstruksi tes.

Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa analisis butir soal adalah: (1) untuk menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya; (2) untuk meningkatkan butir soal melalui tiga komponen analisis yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal dan keterampilan tertentu yang menyebabkan peserta didik sulit. Di samping itu, butir soal yang telah dianalisis dapat memberikan informasi kepada peserta didik dan guru

3. Analisis Butir Soal

Untuk menelaah atau menganalisis butir soal dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelaah secara kualitatif pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis, perbuatan, dan sikap). Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan/diujikan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, dan kunci jawaban/pedoman penskorannya. Dalam melakukan penelaahan setiap butir soal, penelaah perlu mempersiapkan bahan-bahan penunjang seperti: (1) kisi-kisi tes, (2) kurikulum yang digunakan, (3) buku sumber, dan (4) kamus bahasa Indonesia.

4. Analisis Butir Soal dengan Komputer

Analisis butir soal dengan komputer maksudnya adalah penelaahan butir soal secara kuantitatif yang penghitungannya menggunakan bantuan program komputer. Analisis data dengan menggunakan program komputer adalah sangat tepat. Karena tingkat keakuratan hitungan dengan menggunakan program komputer lebih tinggi bila dibandingkan dengan diolah secara manual atau menggunakan kalkulator/ tangan. Program komputer yang digunakan untuk menganalisis data modelnya bermacam-macam tergantung tujuan dan maksud analisis yang diperlukan.

a) Item And Analysis (ITEMAN)

ITEMAN merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Program ini termasuk satu paket program dalam MicroCATⁿ yang dikembangkan oleh Assessment Systems Corporation mulai tahun 1982 dan mengalami revisi pada tahun 1984, 1986, 1988, dan 1993; mulai dari versi 2.00 sampai dengan versi 3.50. Alamatnya adalah Assessment Systems Corporation, 2233 University Avenue, Suite 400, St Paul, Minesota 55114, United States of America.

Program ini dapat digunakan untuk: (1) menganalisis data file (format ASCII) jawaban butir soal yang dihasilkan melalui manual entry data atau dari mesin scanner; (2) menskor dan menganalisis data soal pilihan ganda dan skala

Likert untuk 30.000 siswa dan 250 butir soal; (3) menganalisis sebuah tes yang terdiri dari 10 skala (subtes) dan memberikan informasi tentang validitas setiap butir (daya pembeda, tingkat kesukaran, proporsi jawaban pada setiap option), reliabilitas (KR-20/Alpha), standar error of measurement, mean, variance, standar deviasi, skew, kurtosis untuk jumlah skor pada jawaban benar, skor minimum dan maksimum, skor median, dan frekuensi distribusi skor,

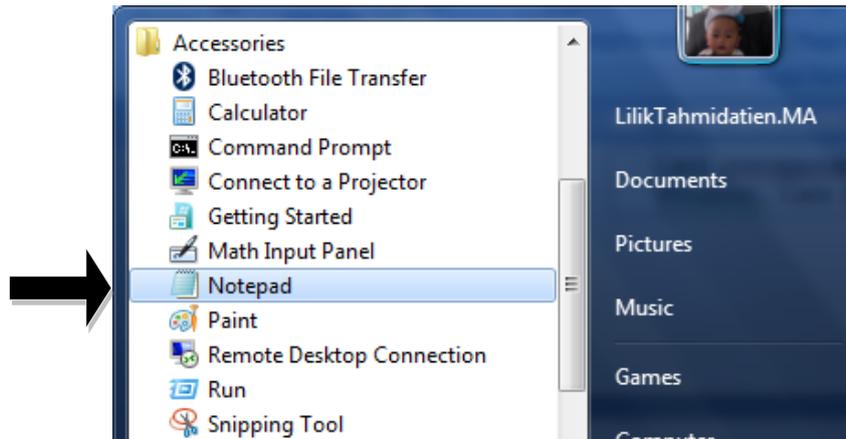
Saat ini telah tersedia ITEMAN tinder Windows 95, 98, NT, 2000, ME, dan XP dengan harga \$299. Sebelum menggunakan program Iteman, bacalah manualnya/buku petunjuk pengoperasionalnya secara seksama. Sebagai contoh, tahap awal adalah membuat "file data" (control tile) yang berisi 5 komponen utama, yaitu:

- 1) Baris pertama adalah baris pengontrol yang mendeskripsikan data.
- 2) Baris kedua adalah daftar kunci jawaban setiap butir soal.
- 3) Baris ketiga adalah daftar jumlah option untuk setiap butir soal.
- 4) Baris keempat adalah daftar butir soal yang hendak dianalisis (jika butir yang akan dianalisis diberi tanda Y (yes), jika tidak diikuti dalam analisis diberi tanda N (no)).
- 5) Baris kelima dan seterusnya adalah data siswa dan pilihan jawaban siswa.

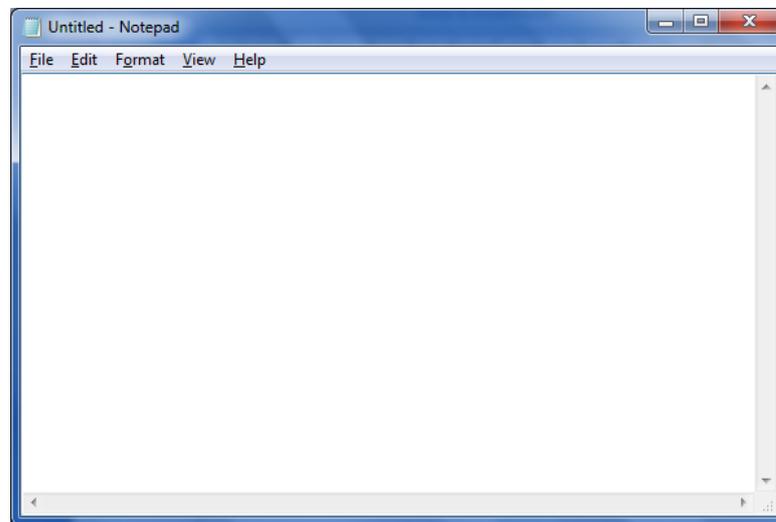
Setiap pilihan jawaban siswa (untuk soal bentuk pilihan ganda) diketik dengan menggunakan huruf, misal ABCD atau angka 1234 untuk 4 pilihan jawaban atau ABCDE atau 12345 untuk 5 pilihan jawaban.

Langkah-Langkah Menggunakan Program ITEMAN

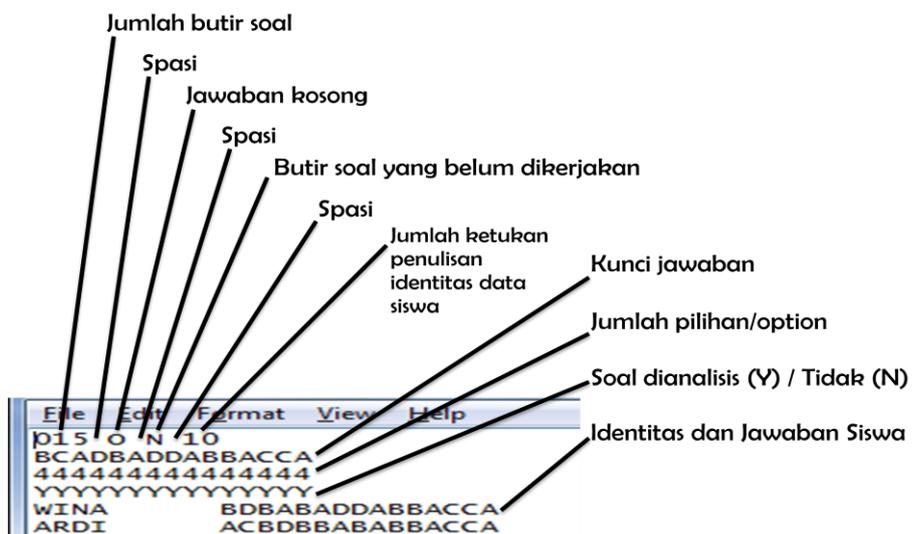
Pertama, data diketik di DOS atau Windows. **Cara termudah** adalah menggunakan program Windows yaitu dengan mengetik data di tempat Notepad. Caranya adalah klik ***Start-Programs-Accessories-Notepad***.



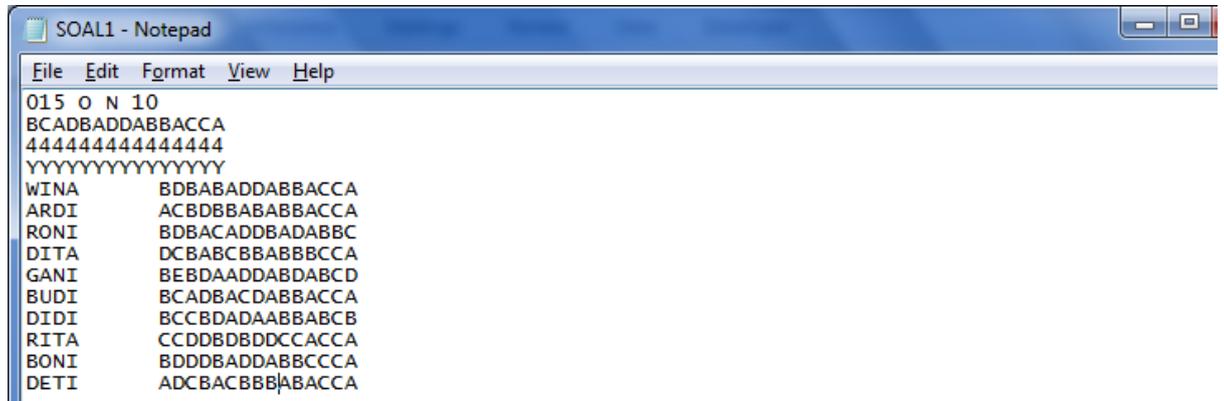
Lalu muncul tampilan notepad



Kedua, Masukkan data dengan memperhatikan format penulisan sesuai program ITEMAN.



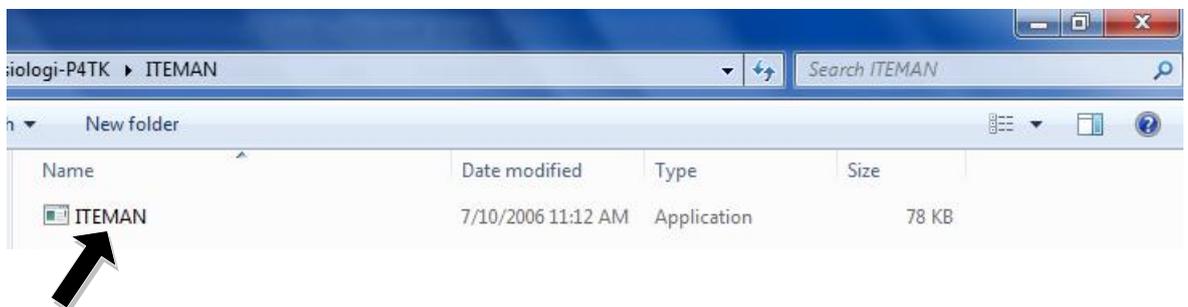
Contoh pengetikan data untuk soal bentuk pilihan ganda:



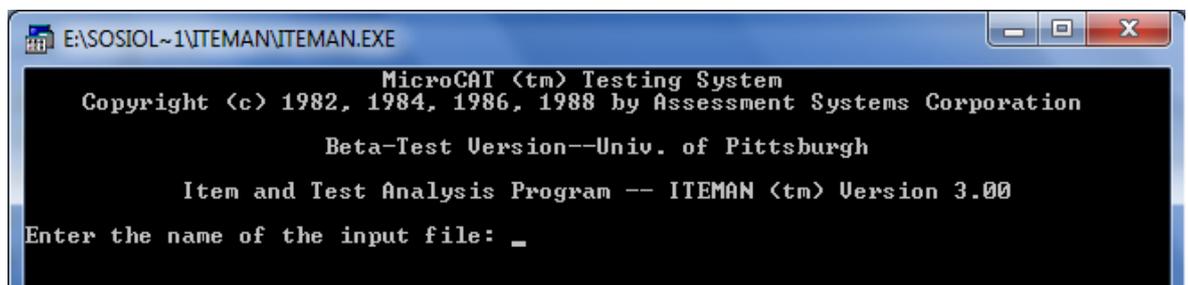
```
SOAL1 - Notepad
File Edit Format View Help
015 O N 10
BCADBADDABBACCA
4444444444444444
YYYYYYYYYYYYYYY
WINA      BDBABADDABBACCA
ARDI      ACBDBBABABBACCA
RONI      BDBACADDBADABBC
DITA      DCBABCBBABBCCA
GANI      BEBDAADDABDABCD
BUDI      BCADBACDABBACCA
DIDI      BCCBDADAABBABCB
RITA      CCDDDBDDCCACCA
BONI      BDDDBADDABBCCCA
DETI      ADCBACBBBABBACCA
```

Ketiga, data yang telah diketik disimpan dalam folder yang didalamnya sudah terisi program ITEMAN. Misal disimpan dengan nama file: **SOAL1**

Keempat, buka program Iteman untuk mulai melakukan analisis yaitu dengan mengklik icon file **Iteman**.



Tunggu sampai muncul tampilan berikut ini:



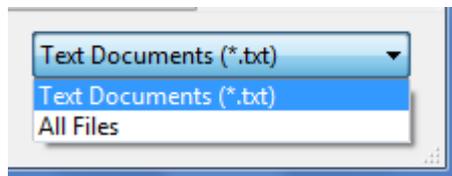
Kemudian isilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar computer seperti berikut.

```
Enter the name of the input file: SOAL1.txt <enter>  
Enter the name of the output file: SOAL1out.txt <enter>  
Do you want the scores written to a file? (Y/N) Y <enter>
```

Kelima, membaca hasil analisis yaitu:

- 1) Buka kembali program notepad
- 2) Klik open
- 3) Klik file **SOAL1out**

*(jika file **SOAL1out** tidak muncul gantilah
Text Documents dengan All Files)*



4) Maka akan muncul tampilan data berikut ini:

SOAL1OUT - Notepad									
File Edit Format View Help									
MicroCAT (tm) Testing System									
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation									
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00									
Item analysis for data from file SOAL1.TXT								Page 2	
Seq. No.	Scale -Item	Item Statistics			Alternative Statistics				
		Prop. Correct	Biser.	Point Biser.	Alt.	Prop. Endorsing	Biser.	Point Biser.	Key
8	0-8	0.600	0.446	0.352	A	0.100	-0.041	-0.024	
					B	0.300	-0.475	-0.360	
					C	0.000	-9.000	-9.000	
					D	0.600	0.446	0.352	*
					other	0.000	-9.000	-9.000	
9	0-9	0.700	0.991	0.752	A	0.700	0.991	0.752	*
					B	0.200	-1.000	-0.754	
					C	0.000	-9.000	-9.000	
					D	0.100	-0.245	-0.144	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
10	0-10	0.700	0.991	0.752	A	0.200	-1.000	-0.754	
					B	0.700	0.991	0.752	*
					C	0.100	-0.245	-0.144	
					D	0.000	-9.000	-9.000	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
11	0-11	0.700	0.578	0.439	A	0.000	-9.000	-9.000	
					B	0.700	0.578	0.439	*
					C	0.100	-0.245	-0.144	
					D	0.200	-0.564	-0.395	
					other	0.000	-9.000	-9.000	

12	0-12	0.800	-0.205	-0.144	A	0.800	-0.205	-0.144	*
					B	0.100	-0.245	-0.144	
					C	0.100	0.573	0.335	?
					D	0.000	-9.000	-9.000	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
13	0-13	0.700	0.475	0.360	A	0.000	-9.000	-9.000	
					B	0.300	-0.475	-0.360	
					C	0.700	0.475	0.360	*
					D	0.000	-9.000	-9.000	
					other	0.000	-9.000	-9.000	
14	0-14	0.900	0.859	0.503	A	0.000	-9.000	-9.000	
					B	0.100	-0.859	-0.503	
					C	0.900	0.859	0.503	*
					D	0.000	-9.000	-9.000	
					other	0.000	-9.000	-9.000	

Membaca data hasil analisis ITEMAN:

- 1) Untuk melihat tingkat kesulitan butir soal maka data yang dilihat adalah data pada kolom **Prop.Correct**
- 2) Untuk melihat daya beda option butir soal maka data yang dilihat adalah data pada kolom **Point Biser**
- 3) Untuk melihat keberfungsian distraktor maka data yang dilihat adalah data pada kolom **Prop.Endorsing**
- 4) Untuk melihat koefisien reliabilitas maka data yang dilihat adalah data Scale Statistics pada point **Alpha**
- 5) Untuk melihat rata-rata tingkat kesukaran/kesulitan semua butir soal maka data yang dilihat adalah data **Scale Statistics** pada **point Mean P**
- 6) Untuk melihat rata-rata daya beda semua butir soal maka data yang dilihat adalah data **Scale Statistics** pada point **Mean Item-Tot.**

Untuk **menginterpretasikan** data maka dapat dilihat rambu-rambu penerimaan butir menurut beberapa ahli teori klasik berikut ini:

- Kriteria baik tidaknya butir soal menurut Ebel dan Frisbie (1991) dalam *Essentials of Educational Measurement* halaman 232 adalah bila korelasi point biserial:
 - >0.40 = butir soal sangat baik;

0.30 - 0.39 = soal baik, tetapi perlu perbaikan;
 0.20 - 0.29 = soal dengan beberapa catatan, biasanya diperlukan perbaikan;
 < 0. 19 = soal jelek, dibuang, atau diperbaiki melalui revisi.

- Adapun tingkat kesukaran butir soal memiliki skala 0 - 1. Semakin mendekati 1 soal tergolong mudah dan mendekati 0 soal tergolong sukar. Menurut Dawson (1972) butir soal yang memiliki tingkat kesulitan 0,25 – 0,75 dikatakan baik.
- Ebel (1972) mengatakan bahwa alat ukur yang memiliki koefisien reliabilitas 0,8 sudah baik. Feldt & Brehmman (1989) menyatakan soal pilihan ganda yang memiliki koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70 sudah dikatakan baik.
- Menurut Ebel (1972) butir yang memiliki **daya pembeda lebih besar atau sama dengan 0,41 dikatakan baik** atau menurut Fernandes (1984) butir soal yang memiliki daya pembeda **lebih besar dari 0,2 sudah bisa dikatakan baik**.
- Nitko (1996) menyatakan distraktor dikatakan berfungsi jika paling sedikit dipilih oleh satu orang peserta tes dari kelompok rendah. Menurut Fernandes (1984) distraktor butir soal dikatakan baik jika paling tidak dipilih oleh 2% dari seluruh peserta.

Untuk mempermudah membuat **kesimpulan dan tindak lanjut** maka dapat dibuat tabel berikut ini:

No.butir	Tingkat Kesulitan	Daya Beda	Keberfungsian Distraktor	Keterangan
1	0,600	0,425	Semua pilihan ada	diterima

			yang memilih	
....
12	0,800	-0,144	Pilihan D tidak ada yang memilih	revisi
13	0,700	0,360	Pilihan A dan D tidak ada yang memilih	revisi

b) Excel

Excel merupakan sebuah program pengolah data yang biasa dinamakan "spreadsheet". Karena program ini dapat digunakan untuk mengolah data yang berupa angka ataupun lainnya. Ada dua cara mengolah data dengan Excel, yaitu (1) melalui program bantu khusus perhitungan statistik dan (2) melalui fungsi statistik yang terdapat di dalam Excel.

Oleh karena itu tidak semua program Statistik ada di program Excel, seperti halnya Uji Validitas butir soal baik soal pilihan ganda maupun bentuk uraian, uji reliabilitas baik bentuk pilihan ganda, uraian maupun reliabilitas non-tes, dalam hal ini harus disain secara manual. Karena di dalam program ini tidak tersedia program tersebut.

c) SPSS (Statistical Program for Social Science)

SPSS merupakan sebuah program pengolah data yang sudah sangat dikenal di dalam dunia pendidikan. Penggunaannya sangat mudah untuk dipahami para guru di sekolah. Semua data diketik di dalam format SPSS yang sudah disediakan. Setelah selesai, kemudian tinggal memilih statistik yang akan digunakan pada menu STATISTIC/ANALYZE. Misalnya uji validitas butir atau reliabilitas tes, diklik pada menu ANALYZE kemudian pilih CORELATE, pilih BIVARIAT, untuk uji reliabilitas pilih RELIABILITY. Di samping itu, program ini dapat digunakan untuk analisis data kuantitatif secara umum, misalnya untuk uji normalitas, homogenitas, dan linearitas data.

Agar mudah pengoperasiannya dalam menggunakan program ini, sebaiknya para guru membaca terlebih dahulu manual/buku pedoman

pengoperasiannya secara saksama. Berikut ini disajikan salah satu contoh penggunaan program SPSS yang digunakan untuk menguji uji normalitas, homogenitas, dan linearitas data, serta uji kesesuaian antara butir soal dan kisi-kisinya (analisis faktor).

Setelah program SPSS dibuka, data di atas di masukkan ke dalam format SPSS. Caranya sangat mudah yaitu seperti berikut.

- a) Klik "Variable View" (letaknya di sebelah kiri bawah).
- b) Ketik X pada kolom "Name".
- c) Klik pada kolom "Label" kemudian ketik Motivasi Belajar.
- d) Ketik Y pada kolom "Name" (di bawah X).
- e) Klik pada kolom "Label" kemudian ketik Prestasi Belajar.
- f) Ketik JK pada kolom "Name" (di bawah Y)
- g) Klik pada kolom "Label" kemudian ketik Jenis Kelamin.
- h) Klik pada kolom "Scale" kemudian klik pada "Nominal".
- i) Klik "Data View" (letaknya di sebelah kin bawah), kemudian masukkanlah data di atas (diktetik) sesuai dengan kolomnya

1) Analisis Faktor Eksploratori

Kegiatan memvalidasi konstruk dilaksanakan setelah tes digunakan/diuji coba. Analisis faktor terdiri dari dua yaitu analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori menekankan pada estimasi parameter dan tes hipotesis, sedangkan analisis faktor eksploratori menekankan pada beberapa faktor yang menjelaskan hubungan antar-indikator dan estimasi muatan faktor.

Untuk menguji validitas kesesuaian antara butir soal dan kisi-kisi konstraknya digunakan analisis faktor.

Konsep validitas berhubungan dengan:

- a. ketepatan,
- b. kebermaknaan, dan
- c. kegunaan suatu skor tes (Gable, 1986: 71).

Macam-macam validitas adalah validitas:

- a. konten yang meliputi: definisi konsep dan definisi operasional;
- b. konstruk, dan
- c. kriterion-related (Gable, 1986: 72-77).

Terdapat empat teknik untuk menganalisis konstruk, yaitu dengan:

- a. korelasi antarvariabel,
- b. analisis multitrait multimethod,
- c. analisis faktor, dan
- d. prosedur known-groups (Gable, 1986: 77).

Analisis faktor dikembangkan oleh Charles Spearman tahun 1904 di USA (Harman, 1976: 3). Analisis faktor adalah suatu nama generik yang diberikan pada suatu kelas metode statistik multivariat yang tujuan utamanya adalah Untuk mendefinisikan struktur dalam matriks data (Hair et. al, 1998: 90). Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menguji secara empirik hubungan antar butir soal dan untuk menentukan kelompok soal yang saling menentukan sebagai suatu faktor/konstruk yang diukur melalui instrumen (Gable, 1986: 85).

Jadi tujuan utamanya dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu untuk menentukan:

- 1) faktor umum yang diperlukan terhadap jumlah patern korelasi antar semua pasangan tes dalam satu set tes;
- 2) faktor umum sesungguhnya (asli) yang menghitung untuk tes interkorelasi;
- 3) proporsi varian untuk suatu variabel observasi yang dihubungkan dengan varian faktor umum (Crocker and Algina, 1986: 305-306) atau sebagai pengenalan struktur melalui peringkasan data atau reduksi/pengurangan data (Hair et al., 1998: 95).

Adapun manfaat analisis faktor adalah:

- a) memberitahu kita tes-tes dan ukuran-ukuran yang saling dapat serasi atau sama tujuannya dan sejauhmana kesamaannya,
- b) membantu menemukan dan mengidentifikasi kebutuhan- kebutuhan atau sifat-sifat fundamental yang melandasi tes dan pengukuran (Kerlinger, 1993: 1000).

Langkah atau prosedur penggunaan analisis factor eksploratori selalu memproses melalui 4 tahap, yaitu:

- 1) perhitungan korelasi matriks untuk semua variabel,
- 2) ekstraksi faktor untuk menentukan jumlah faktor,
- 3) rotasi, untuk membuat faktor lebih bermakna, dan
- 4) perhitungan skor setiap faktor untuk setiap case.

Cara pengoperasionalan dalam program SPSS adalah seperti berikut.

Pilih menu STATISTIC atau ANALYZE

DATA REDUCTION

FACTOR

Pada boks dialog variabel yang akan dianalisis dimasukkan ke kotak VARIABLES. Klik pada kotak DESCRIPTIVE (misal: klik "initial solution" pada kolom statistics dan "KMO and Bartlett's test of sphericity" pada kolom correlation Matrix), EXTRACTION, ROTATION, SCORES, atau OPTION. Hasil print outnya terdiri dari beberapa tabel dan sebuah grafik "scree plot".

Berikut ini dijelaskan beberapa hasil print out analisis faktor eksploratori dan penafsirannya.

2) Analisis Faktor Eksploratori

Kegiatan memvalidasi konstruk dilaksanakan setelah tes digunakan/diuji coba. Analisis faktor terdiri dari dua yaitu analisis faktor eksploratori dan konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori menekankan pada estimasi parameter dan tes hipotesis, sedangkan analisis faktor eksploratori menekankan pada beberapa faktor yang menjelaskan hubungan antar-indikator dan estimasi muatan faktor.

Untuk menguji validitas kesesuaian antara butir soal dan kisi-kisi konstraknya digunakan analisis faktor. Konsep validitas berhubungan dengan: (1) ketepatan, (2) kebermaknaan, dan (3) kegunaan suatu skor tes (Gable, 1986: 71). Macam-macam validitas adalah validitas: (1) konten yang meliputi: definisi konsep dan definisi operasional; (2) konstruk, dan (3) kriterion-related (Gable, 1986: 72-77). Terdapat empat teknik untuk menganalisis konstruk, yaitu dengan:

(1) korelasi antarvariabel, (2) analisis multitrait multimethod, (3) analisis faktor, dan (4) prosedur known-groups (Gable, 1986: 77).

Analisis faktor dikembangkan oleh Charles Spearman tahun 1904 di USA (Harman, 1976: 3). Analisis faktor adalah suatu nama generik yang diberikan pada suatu kelas metode statistik multivariat yang tujuan utamanya adalah Untuk mendefinisikan struktur dalam matriks data (Hair et. al, 1998: 90). Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menguji secara empirik huburungan antar butir soal dan untuk menentukan kelompok soal yang saling menentukan sebagai suatu faktor/konstruk yang diukur melalui instrumen (Gable, 1986: 85). Jadi tujuan utamanya dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu untuk menentukan: (1) faktor umum yang diperlukan terhadap jumlah patern korelasi antar semua pasangan tes dalam satu set tes; (2) faktor umum sesungguhnya (asli) yang menghitung untuk tes interkorelasi; (3) proporsi varian untuk suatu variabel observasi yang dihubungkan dengan varian faktor umum (Crocker and Algina, 1986: 305-306) atau sebagai pengenalan struktur melalui peringkasan data atau reduksi/pengurangan data (Hair et al., 1998: 95).

Adapun manfaat analisis faktor adalah: (1) memberitahu kita tes-tes dan ukuran-ukuran yang saling dapat serasi atau sama tujuannya dan sejauhmana kesamaannya, (2) membantu menemukan dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau sifat-sifat fundamental yang melandasi tes dan pengukuran (Kerlinger, 1993: 1000).

Langkah atau prosedur penggunaan analisis factor eksploratori selalu memproses melalui 4 tahap, yaitu: (1) perhitungan korelasi matriks untuk semua variabel, (2) ekstraksi faktor untuk menentukan jumlah faktor, (3) rotasi, untuk membuat faktor lebih bermakna, dan (4) perhitungan skor setiap faktor untuk setiap case.

Cara pengoperasional dalarn program SPSS adalah seperti berikut.

Pilih menu STATISTIC atau ANALYZE

DATA REDUCTION

FACTOR

Berikut ini dijelaskan beberapa hasil print out analisis faktor eksploratori dan penafsirannya :

a) Statistik Deskriptif

Dalam tabel statistik deskriptif berisi informasi yang bersifat deskriptif seperti mean dan standard deviasi setiap variabel. Jika besarnya mean variabel sangat dekat/ekstrim pada skala jawaban dan standar deviasinya rendah, maka korelasi antarvariabel akan rendah dan berakibat rendah pula pada hasil analisis faktor (Gabel, 1986:91).

b) Bartlett test of sphericity

Tes ini digunakan untuk mengetes hipotesis yang korelasi matriknya merupakan suatu matriks identitas, yaitu semua diagonal adalah 1 dan semua yang tidak diagonal (off-diagonal) adalah 0. Hasil tes menunjukkan bahwa sample data berasal dari suatu populasi normal multivariat atau tidak. Jadi bila nilai tes statistik dari sphericity luas/tinggi dan level signifikannya kecil, maka dapat dikatakan bahwa matriks korelasi populasi adalah signifikan (Norusis, 1993:50).

c) Pengukuran Sampling Kaiser Meyer Olkin (KMO)

KMO merupakan suatu indeks perbandingan besarnya koefisien korelasi observed dan besarnya koefisien korelasi parsial. Jika jumlah kuadrat korelasi parsial pada semua pasangan variabel adalah kecil bila dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasinya, maka besar KMO mendekati 1. Jika besar KMO kecil atau rendah maka hasil analisis faktornya adalah tidak baik. Kaiser (1974) dalam Norusis (1993: 52) mengklasifikasi tentang besarnya KMO adalah bila besarnya 0,90 bagus sekali (marvelous), 0,80 bermanfaat (meritorious), 0,70 sedang/cukup (middling), 0,60 sedikit cukup (mediocre), 0,50 gawat/menyedihkan (miserable), dan di bawah 0,50 tidak dapat diterima (unacceptable).

d) Matriks Korelasi antar butir

Korelasi antarbutir menunjukkan adanya beberapa butir yang saling berhubungan secara wajar. Jika korelasi antarvariabel adalah kecil, maka variabel-variabel itu berhubungan dengan faktor-faktor secara umum (share common factors) (Norusis, 1993:50)

e) Matriks Korelasi Anti-image

Matrik ini berisi korelasi anti-image, maksudnya adalah koefisien korelasi parsial yang negatif. Jika proporsi untuk koefisien yang banyak adalah tinggi, maka kita dipersilakan untuk mempertimbangkan kembali tepat atau tidak menggunakan analisis faktor.

f) Ekstraksi Faktor

Ekstraksi merupakan hubungan antara faktor-faktor dan variabel individu. Tujuan utama ekstraksi faktor adalah untuk menentukan jumlah faktor. Beberapa jumlah faktor yang diperlukan untuk merepresen data. Hal ini sangat membantu dalam menguji persentase total varian (eigenvalues) untuk masing-masing faktor. Total varian merupakan jumlah varian masing-masing variabel. Di samping itu, untuk menentukan jumlah faktor dapat dilihat pada "scoree test" atau "scoree plot" Dari tes atau plot itu dapat diketahui jumlah faktor yang ditunjukkan dengan beberapa garis yang panjang dan curam serta diikuti dengan jumlah garis yang pendek-pendek.

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Untuk memahami materi analisis butir soal dengan program berbantuan komputer, anda perlu membaca secara cermat modul ini, gunakan referensi lain sebagai materi pelengkap untuk menambah pengetahuan anda. Dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan tulis apa yang dirasa penting.

Silahkan berbagi pengalaman anda dengan cara menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - a. Memahami dan mencermati materi diklat
 - b. Mengikuti arahan praktik penggunaan software analisis butir soal oleh pemateri
 - c. Mengerjakan latihan/lembar kerja/tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar; dan menyimpulkan
 - d. Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - a. Mendiskusikan materi pelatihan
 - b. Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan
 - c. Penyelesaian masalah /kasus

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

Tugas

- Setelah mempelajari bahan tersebut di atas, coba praktekkan pembelajaran anda terkait materi analisis butir soal dengan program iteman dengan menggunakan data yang telah disediakan secara berpasangan dengan teman sebangku anda.
- Disajikan data hasil ujian sebagai berikut :

KUNCI JAWABAN SOAL UJIAN :

CADBDCBCCDABAACABCDABCDABDCDABDABACCCBCABABDBCBCBABC

NAMA DAN JAWABAN PESERTA :

TUTIK DAMAYATI

CADBDCBCCDABBACABCDBBCDBDCBDBDABACCCBCABABDBCDBABC

RINI SULISTIYATIN

CADBDCBDCDABBACABCDBBCDBDCBDBDABACCCBCABABDBCDBABC

NANI KUSMIYATI

CADCDCBDCDABBACABCDBBCDBDCBDBDABACCCBCABABDBCDAACD

EVI MEILANI

CADADCBDDBDABAACABCDBBCDBACBABAAC0DBCABABDB0DABCD

M. AGUNG PRIYANTO

CBDCDCCDCDABBACABCDBBCDBDCBDBDACACCCBCABABDBCDBANN

ABEN DAMARUDIN

CBDCDCCCCDCBBACABCDBBCDBDCBDBDACACCCBCABABD0CDAACD

KUSNAENI

CADCDCCBDBDACBACABCDBBCDBDCBDBDACACADBCABABDBCDAACD

AGUS ARYADI

CADBCCBDCDAABACBACAABCDBCCBBCAAABBDBBCABABDBCDAACD

SULASTRI IRIANI

CADBBCBCBDABBACABDDABCDBDCDABDBAACCCBCABABDBCDAANN

RIFATUL FIKRIYA

CADBCCCCDABAACABCDABCDBDBDABDABACCDBCABDBDBCBAABCD

- Ketik dan simpan data tersebut pada file: Tes1.txt <Save>
- Dengan Program Iteman analisislah hasil :
 1. Tingkat kesulitan butir soal.
 2. Daya beda option butir soal.
 3. Keberfungsian distraktor.
 4. Koefisien reliabilitas.
 5. Rata-rata tingkat kesukaran/kesulitan semua butir soal.
 6. Rata-rata daya beda semua butir soal.
 7. Laporkan dan presentasikan hasil analisis anda di depan kelas

F. RANGKUMAN

Kegiatan menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan penelaahan adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Di samping itu, tujuan analisis butir soal juga untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah/belum memahami materi yang telah diajarkan

Manfaat yang didapat dari menelaah butir soal antara lain : (1) dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan, (2) sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas, (3) mendukung penulisan butir soal

yang efektif, (4) secara materi dapat memperbaiki tes di kelas, (5) meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Di samping itu, manfaat lainnya adalah: (1) menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan, (2) memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas, (3) memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa, (4) memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum, (5) merevisi materi yang dinilai atau diukur, (6) meningkatkan keterampilan penulisan soal.

ITEMAN merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Program ini dapat digunakan untuk: (1) menganalisis data file (format ASCII) jawaban butir soal yang dihasilkan melalui manual entry data atau dari mesin scanner; (2) menskor dan menganalisis data soal pilihan ganda dan skala Likert untuk 30.000 siswa dan 250 butir soal; (3) menganalisis sebuah tes yang terdiri dari 10 skala (subtes) dan memberikan informasi tentang validitas setiap butir (daya pembeda, tingkat kesukaran, proporsi jawaban pada setiap option), reliabilitas (KR-20/Alpha), standar error of measurement, mean, variance, standar deviasi, skew, kurtosis untuk jumlah skor pada jawaban benar, skor minimum dan maksimum, skor median, dan frekuensi distribusi skor.

G. UMPAN BALIK

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari analisis butir soal dengan program berbantuan komputer Iteman?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis butir soal dengan program berbantuan komputer Iteman?
3. Menurut Anda hikmah apa yang Bapak/Ibu terima setelah mempelajari analisis butir soal dengan program berbantuan komputer Iteman jika dihubungkan dengan tugas-tugas disekolah?
4. Setelah Saudara mempelajari modul diatas, apakah yang akan saudara lakukan terhadap hasil penilaian pembelajaran di sekolah/madrasah ditempat Bapak/Ibu bertugas?

DAFTAR PUSTAKA

Kegiatan Pembelajaran 1

- Abdullah, Taufik. dan Abdurrahman Surjomihardo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Ali, R. Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKiS.
- Bari, M.S. 2008. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Frederick, William H. dan Soero Soeroto (eds.). 2005. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES
- Hariyono. 1998. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang,
- Maarif, Syafi'i. 1985. *Ibn Khaldun dan Kontribusinya di Bidang Sejarah*. Yogyakarta: LSIPM.
- Moehnilabib, et.al. 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1979. *Sejarah Demi MasaKini*. Jakarta: UI Press.
- Sutrasno. 1975. *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pradnya Paramita

Kegiatan Pembelajaran 2

- Abdurachman Surjomihardjo. 1983. *Metode dan Metodologi*. Dalam Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan Suatu Kumpulan Prasaran Pada Berbagai Lokakarya Jilid I. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
- Hamid Hasan, S. 1997. "Kurikulum dan Buku Teks Sejarah" dalam Kongres Nasional Sejarah 1996 Jakarta Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- _____. 2007. 'Kurikulum Pendidikan Sejarah Berbasis Kompetensi'. Makalah pada *Seminar Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (Ikahimsi) XII*. Semarang, 16 April 2007.

- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Hamzah B. Uno. 2008. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hugiono & Poerwantana,P.K. 1987: *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : PT Bina Aksara
- Ibnu Hizam. 2007. “*Kontribusi Minat Belajar dan Kemampuan Klarifikasi Nilai Sejarah dalam Pembentukan Sikap Nasionalisme*” dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 3, No. 2, Juni 2007.
- I Gde Widja. 1989. *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- _____. 1991. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung : Angkasa.
- Imam Barnadib. 1973. *Dasar-Dasar Metode Sejarah Pendidikan* . Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta
- Jarolimek, John. 1971. *Social Studies in Elementary Education*.Ney York: Macmillan Co.
- Kosasih Djahiri. 1980. *Pendekatan Tehnik Pengembangan Materi dan Program Pengajaran IPS*. Jakarta: P3G Depdikbud
- Koentjaraningrat. 1963. *Guna Antropologi untuk Historiografi Indonesia*. Dalam Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia Jilid I: 14-45. Jakarta: Universitas Indonesia
- Krug, Mark. M. 1967. *History and the Social Sciences*. Walthan Mass: Braisdell
- Mar’at. 1982. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moedjanto, G . 1985. “*Pengembangan Konsep Diri Lewat Pengajaran Sejarah*”. dalam Seminar Nasional IV di Yogyakarta tanggal 16 s/d 19 Desember 1985. Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Moh. Ali,R. 1963. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Sartono Kartodirdjo.1993.*Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sidi Gazalba . 1966. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Syaiful B. Djamarah & Aswan Zain. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sukmadinata. 1997. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutrisno Kuntoyo .1985.“ *Suatu Catatan Tentang Kesadaran Sejarah*”. Dalam *Pemikiran Tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud
- Taufik Abdullah (Ed). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____. 1996. “ *Di Sekitar Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif*”. Dalam *Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi 6* oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kegiatan Pembelajaran 3

- Daliman. 2001. *Sejarah Indonesia Abad 19- Awal Abad 20*. Yogyakarta : FIS UNY
- Kartodirdjo, Saartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sejarah Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wcana.
- Kurniawan, Hendra. 2004. *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamikan Perekonomian Petani Jawa 1830 – 1870*. Dalam *Jurnal Social* Vol 11, No. 2 (hlm. 163-172)
- Ricklef, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : UGM Press
- Robert van Niel. 1988. *Warisan Sistem Tanam Paksa Bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*. Dalam Booth, Anne (Eds). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3 ES
- Scott, James C.. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Thee Kian-we. 1988. *Perekonomian Indonesia di Zaman Kolonial*. Dalam Booth, Anne (Eds). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3 ES.

Kegiatan Pembelajaran 4

- Kemdikbud. 2007. *Permendiknas no 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan*.

- .. 2013. *Permendikbud 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .. 2013. *Permendikbud 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .. 2013. *Permendikbud 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .. 2014. *Permendikbud 59 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .. 2014. *Permendikbud. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- .. 2014. *Permendikbud. 104 tahun 2014 tentang Penilaian hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran 5

Badrun Kartowagiran. 2005. *Item and Test Analysis (ITEMAN); Makalah Penyegaran Metodologi Penelitian Pascasarjana UNY Yogyakarta 21-30 Mart 2005*.

Tim. 2008. *Panduan Analisis Butir Soal*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.



PPPPTK Pkn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo

KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id